

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BALAI REHABILITASI SOSIAL
ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
(BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Helga Andi Pratama

NPM : 167310649

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Helga Andi Pratama
NPM : 167310649
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Balai Rehabilitasi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Helga Andi Pratama
NPM : 167310649
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Balai Rehabilitasi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru


Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Anggota'


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 134/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Helga Andi Pratama
N P M : 1677310649
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Program balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Membina Anak Putus Sekolah.**

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal, S.Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, LC, M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Juli 2021
Dekan,
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1136 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Helga Andi Pratama
NPM : 1677310649
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Program balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Membina Anak Putus Sekolah.**

Nilai Ujian : Angka : " 79,1 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, LC, M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Helga Andi Pratama
NPM : 167310649
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Balai Rehabilitasi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri., S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru beserta pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku

kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon saraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis Ttd.

Helga Andi Pratama

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
B. Kerangka Pikir.....	47
C. Konsep Operasional	48
D. Operasional Variabel.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	58
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	59
B. Gambaran Umum BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.....	63

C. Organisasi dan Tata Kerja	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Pembahasan dan Hasil Penelitian Implementasi Program pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dalam Membina Remaja Putus Sekolah	76
B. Faktor Penghambat Dalam Membina Remaja Putus Sekolahdi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	140
BAB VI PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	158
DAFTAR KEPUSTAKAAN	160

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1.	Jumlah Angka Anak Putus Sekolah di Pekanbaru 2019	4
I.2	Data penerima manfaat PSBR angkatan 70 Tahun 2019	17
II.1	Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam Membina Anak Putus Sekolah	41
III.1	Jadwal waktu penelitian tentang Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam Membina Anak Putus Sekolah	47

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helga Andi Pratama
NPM : 167310649
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam Membina Anak Putus Sekolah

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021
Pelaku Pernyataan,



Helga Andi Pratama

**IMPLEMENTASI PROGRAM BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK
YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK)
RUMBAI PEKANBARU DALAM MEMBINA
ANAK PUTUS SEKOLAH**

ABSTRAK

Oleh

Helga Andi Pratama

Upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Pemerintah dengan menciptakan program perlindungan berbasis masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan berupaya menangani anak terlantar. Dari hasil observasi diperoleh permasalahan yaitu Masih kurangnya sarana dan Prasarana yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, tidak efektifnya belajar mengajar pada saat ini karena sarana kelas yang sedang direnovasi, kemudian prasarana yang kurang pada masing-masing jurusan, masih kurangnya alat-alat Praktek untuk siswa sehingga siswa hanya mengetahui alat-alat standar saja dan terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan tidak dapat berjalan optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam membina anak putus sekolah dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap berkompeten memberikan keterangan kegiatan pembinaan yang dalam kategori pembina dan yang dibina serta informan kunci pembinaan. Kesimpulan penelitian ini adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru belum dilakukan secara optimal dalam melakukan pembinaan karena ada beberapa kendala yang ditemukan baik dalam kegiatan bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan optimal. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya untuk instruktur pembina sebaiknya lebih diberikan pemahaman mengenai upaya mensejahterakan remaja dalam kegiatan bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan didalam Balai, kemudian sarana dan prasarana untuk pembinaan juga disesuaikan dengan kbutuhan dalam pembinaan remaja.

Kata Kunci : Implementasi, Membina Anak Putus Sekolah

**IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL REHABILITATION CENTER FOR
CHILDREN WHO NEED SPECIAL PROTECTION (BRSAMPK)
RUMBAI PEKANBARU IN FOSTERING
CHILDREN OUT OF SCHOOL**

ABSTRACT

By

Helga Andi Pratama

Social Welfare development efforts carried out by the Government by creating community-based protection programs aimed at helping the poor in improving the quality of Human Resources and trying to deal with neglected children. From the observations, it was found that the problem was that there was still a lack of facilities and infrastructure at the Rumbai Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK), the ineffectiveness of teaching and learning at this time because the classroom facilities were being renovated, then the infrastructure was lacking in each department. , there is still a lack of practical tools for students so that students only know about standard tools and limited human resources to provide counseling and guidance to children who need special protection, so that the implementation of guidance activities cannot run optimally. The purpose of this study was to determine the implementation of the Rumbai Pekanbaru Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) program in fostering school dropouts and to determine the inhibiting factors in its implementation. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted to informants who were considered competent to provide information on coaching activities that were in the category of coaches and those who were fostered as well as key informants of coaching. The conclusion of this research is that the Center for Social Rehabilitation of Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru has not been carried out optimally in conducting coaching because there are several obstacles found both in social guidance activities and skills guidance which causes the coaching process to not run optimally. Suggestions in this study are that it is better for the coaching instructors to be given more understanding about efforts to prosper teenagers in social guidance activities and skills field guidance within the Balai, then the facilities and infrastructure for coaching are also adjusted to the needs of youth development.

Keywords: Implementation, Fostering School Dropouts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah Negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa inggris disebut *governance* yang berarti “*act, pact, manner, of governing*”, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan.

Governance merupakan suatu proses atau kegiatan, yang oleh Kooiment berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah daerah adalah wewenang administrasi atau

implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat. Asas dekonsentrasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau salah satunya membentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dimana sumber dana yang digunakan dalam penyelenggaraannya berasal dari APBN dan perekrutan pegawai untuk panti dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Daerah yang pelaksanaannya dibawah naungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya dana yang digunakan berasal dari APBD dan perekrutan pegawai untuk panti dilakukan oleh pemerintah Daerah. Peranan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pencegahan masalah sosial. Pencegahan masalah tersebut salah satunya dengan mensejahterakan anak-anak terlantar berdasarkan acuan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjadi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Usaha kesejahteraan sosial untuk anak terlantar standar pelayanan sosial untuk anak putus sekolah. Dalam hal ini standar pelayanan sosial anak putus sekolah yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) (PSBR) berdasarkan Standar kementerian Sosial dengan

tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan standar sebagai patokan dalam penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).
2. Memberikan berbagai ukuran penyelenggaraan dan kinerja pelayanan sosial anak putus sekolah yang diselenggarakan oleh PSBR.

Standar pelayanan dapat dilihat dari perspektif kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, prosedur pelayanan sosial, maupun kebijakan pengembangannya. Standar harus disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/Menkes-Kesos/III/2000 Tentang Standarisasi Panti Sosial. Adapun pelaksanaannya pemerintah dalam hal ini Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya terhadap remaja putus sekolah yang berada di wilayah Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru berpedoman pada Standar Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2008.

Standar pelayanan sosial anak putus sekolah terlantar merupakan ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dipenuhi bagi

penyelenggara pelayanan sosial, yang meliputi; standar kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, kebutuhan dasar, perlindungan anak, prosedur pelayanan sosial, praktek pengasuhan, administrasi pelayanan, jaringan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Pelayanan remaja sosial adalah proses bantuan/ pertolongan yang dilakukan secara terarah, terencana dan sistematis kepada remaja atau anak yang berusia 15-17 tahun yang menjamin dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme. Remaja putus sekolah terlantar yang dibina yaitu remaja putus sekolah SD, putus sekolah SLTP dan putus sekolah SLTA yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dari keluarga yang mengalami permasalahan sosial.

Tabel 1. Jumlah Angka Anak Putus Sekolah di Pekanbaru 2019

No.	Tingkatan Sekolah	Jumlah Anak Putus Sekolah
1.	SD/MI	94.250
2.	SMP/MTS	77.010
3.	SMA/SMK/MA	69.180
Jumlah		240.440

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2020

Sasaran dari Buku Standar Pelayanan Sosial Anak Putus Sekolah melalui PSBR, yaitu;

1. PSBR yang dikelola pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memberikan pelayanan sosial bagi anak putus sekolah.
2. Lembaga pelayanan sejenis PSBR yang dikelola masyarakat, yang memberikan pelayanan sosial bagi anak putus sekolah.
3. Para pengambil kebijakan dipusat maupun daerah, dari unsur legislatif dan eksekutif dalam penanganan anak putus sekolah.
4. Para pemerhati baik perorangan maupun kelompok yang memberikan perhatian atau kepedulian, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah anak putus sekolah.

Standar Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) (PSBR) memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh PSBR atau lembaga pelayanan sosial sejenis dalam memberikan pelayanannya kepada remaja putus sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat/swasta. Unsur-unsur tersebut mencakup sebelas (11) standar, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, kebutuhan remaja, perlindungan, prosedur pelayanan sosial, jaringan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Standar pelayanan sosial putus sekolah oleh panti soaial bina remaja tidak terlepas dari sistem dekonsentrasi sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106HUK/2009 tentang organisasi dan tata kerja panti sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

“Panti sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.”

Adapun Tugas Pokok dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru yaitu memberikan pelayanan kepada remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat terwujudnya kemandirian serta terhindar dari berbagai kemungkina timbulnya masalah sosial bagi dirinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru

mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya, penyusunan standarisasi pelayanan, pelayanan dan rehabilitas remaja putus sekolah,terminasi, dan pembinaan lanjut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada remaja putus sekolah didalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.
- c. Pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan.
- d. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksana pelayanan.
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan dengan Departemen Sosial Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan program pemerintah, pemerintah pusat mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang terletak di Rumbai jl.Khayangan No.160 Rumbai Kec.Rumbai Pesisir, Kel.Meranti Pandak pekanbaru. Berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai ini guna untuk menampung anak yang kurang mampu agar setara dengan anak lainnya yang sekolah disekolah-sekolah umum. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ini langsung dibentuk oleh Kemensos RI artinya langsung perintah dari pusat yang diturunkan kedaerah untuk anak-anak yang kurang mampu. Atau biasa disebut dengan istilah Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan Rumah Tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Tentunya program yang dilaksanakan ini sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi.Pencapaian kinerja yang tinggi adalah mengenai Implementasi Program

Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai dalam Membina Anak Putus Sekolah. Sehubungan dengan itu ada beberapa uraian tujuan yang hendak dicapai di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai adalah:

1. Terhindarnya remaja dari berbagai masalah sosial sebagai akibat dari putus sekolah dan terlantar
2. Terwujudnya kemandirian remaja putus sekolah atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri dalam memilih, menetapkan dan memutuskan cara terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi
3. Terwujudnya kemampuan dan kekuatan remaja dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Bagi para peneliti, implementasi dipahami secara kompleks sebagai sebuah transaksi (pertukaran) berbagai sumber daya yang melibatkan banyak stakeholder. Pelaksanaan berarti transaksi. Untuk melaksanakan program, pelaksana harus terus berurusan dengan tugas, lingkungan, klien, dan satu sama lain. Formalitas organisasi dan mekanisme administrasi yang penting sebagai latar belakang, tetapi keberhasilan utama adalah terus menerus menghadapi konteks, kepribadian, dan peristiwa. Dan penting untuk adaptasi tersebut adalah kesediaan mengakui dan memperbaiki kesalahan, untuk menggeser arah, dan belajar dari melakukan. Tidak

ada yang lebih penting untuk pelaksanaan dari koreksi diri apa-apa lebih memhatikan dari perseverasi buta.

Bergerak dari suatu kebijakan yang telah dijelaskan diatas, pemerintah juga berkewajiban melayani setiap apa-apa yang ada didalam negara ini sebelum masuk kedalam tahap-tahap pelayanan yang tentunya sudah diprogramkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai ini sejenak penulis akan menjelaskan terlebih dahulu defenisi-defenisi pelayanan menurut para ahli. Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2014 mendefenisikan pelayanan umum sebagai Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Keputusan MENPAN 15/2014). Dari bentuk-bentuk defenisi pelayanan yang telah diuraikan diatas Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai ini memberiakan pelayanan kepada siswa-siswa yang mana diantaranya ada tahap-tahap pelayanan

yang telah dibuat oleh instansi pemerintah pusat. Perekrutan remaja putus sekolah dilakukan dalam dua bentuk yaitu:

1. Sistem utusan (close system) yaitu mengirim surat permintaan calon penerima pelayanan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tanpa memantau langsung proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kabupaten/Kota tersebut.
2. Open system, yaitu sosialisasi langsung kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan langsung mendaftarkan diri di PSBR Rumbai Pekanbaru. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan dengan cara penyebaran leaflet dan memasang spanduk penerima calon siswa.

Sebelum memasuki tahap-tahap pelayanan peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu syarat-syarat untuk siswa/i yang ingin masuk kedalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai yaitu sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Remaja laki-laki dan perempuan, berusia 15 s/d 17 tahun;
- 2) Putus sekolah, dengan batasan tidak tamat SLTA, namun memiliki kemampuan dasar berupa membaca, menulis dan berhitung;
- 3) Berasal dari keluarga tidak mampu/terlantar;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Belum pernah menikah;
- 6) Tidak sedang bekerja;
- 7) Berasal dari Daerah Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi
- 8) Bersedia diasramakan dan mentaati seluruh peraturan panti

b. Persyaratan Administrasi (Khusus)

- 1) Fotokopi ijazah terakhir, 1 lembar;
- 2) Fotokopi KTP (bagi yang berusia 17 tahun ke atas), 1 lembar;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga, 1 lembar;
- 4) Surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah;
- 5) Surat keterangan belum mampu dari desa/lurah;
- 6) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/ Dokter;
- 7) Surat izin orang tua/ wali;
- 8) Surat pernyataan kesanggupan mengikuti peraturan panti;
- 9) Fas foto ukuran 3x4=4 lembar, 4x6=12 lembar;
- 10) Potokopi kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

11) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak Kepolisian.

Berikut adalah tahap-tahap pelayanan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai. Tahap-Tahap pelayanan :

a. Tahap pra pelayanan dalam panti

1. Pendekatan awal

Tahap pendekatan awal merupakan tahap sosialisasi program pelayanan di PSBR Rumbai Pekanbaru kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan (remaja putus sekolah dan terlantar) yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengirimkan surat kepada daerah kabupaten/ kota se-Provinsi riau sekaligus sosialisasi dan informasi tentang pelayanan dipanti
- Mensosialisasikan kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan dengan cara penyebaran leaflet dan memasang spanduk penerimaan calon siswa
- Melaksanakan identifikasi terhadap calon penerima pelayanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- Memberikan motivasi kepada calon penerima pelayanan dan masyarakat.

a. Registrasi, seleksi administrasi dan assessment awal

Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan kelengkapan administrasi terhadap calon penerima pelayanan sekaligus assessment awal untuk mengetahui minat dan bakat calon siswa

b. Pengumuman kelulusan calon siswa

Pengumuman kelulusan calon siswa merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi kelengkapan administrasi awal. Pengumuman kelulusan calon siswa dilakukan setelah panitia menganalisa hasil seleksi dan assessment awal. Pengumuman kelulusan calon siswa dilakukan setelah panitia menganalisa hasil seleksi dan assessment awal. Kelulusan calon siswa didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan calon siswa
- b. Usia calon siswa
- c. Kelengkapan administrasi calon siswa
- d. Minat dan bakat calon siswa
- e. Jurusan yang dipilih calon siswa
- f. Asal daerah calon siswa

c. Pengasramaan

Pengasramaan dilakukan mulai saat calon siswa mengikuti kegiatan registrasi seleksi dan assessment awal. Pengasramaan calon siswa dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis kelamin calon siswa (dipisah)
- b. Asal daerah calon siswa
- c. Jurusan yang diambil oleh calon siswa
- d. Kapasitas yang daya tampung asrama

d. Tahap orientasi

Orientasi merupakan langkah awal untuk memperkenalkan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai pekanbaru kepada calon siswa. Untuk

angkatan 72 kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu.

e. Tahap penempatan pada program kegiatan

Penempatan calon siswa pada program kegiatan didasarkan pada minat dan bakat serta jurusan yang dipilih oleh calon siswa.

Penempatan program pelayanan oleh petugas didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Minat dan bakats calon siswa
- b. Jurusan yang dipilih oleh calon siswa
- c. Asal daerah calon siswa
 - Kapasitas daya tampung masing-masing jurusan, yaitu:
 1. Jurusan menjahit 17 orang
 2. Jurusan teknik las 15 orang
 3. Jurusan otomotif 12 orang
 4. Jurusan tata rias 14 orang

Rekapitulasi Per daerah:

1. Prov. Jambi : 1 orang
2. Prov. Sumbar : 3 orang
3. Prov. Kepri : 4 orang
4. Kota pekanbaru : 9 orang
5. Kota dumai : 5 orang
6. Kab. Siak : 7 orang
7. Kab. Pelalawan : 2 orang
8. Kab. Kep. Meranti : 5 orang
9. Kab. Kuantan singing : 4 orang
10. Kab, Indragiri hulu : 4 orang
11. Kab Indragiri hilir : 6 orang
12. Kab. Rokan hulu : 7 orang
13. Kab. Rokan hilir : 3 orang
14. Kab. Kampar : 6 orang
15. Kab. Bengkalis :4 orang

Rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin

1. Laki-laki 40 orang
 2. Perempuan 30 orang
- Jumlah (70 orang)

f. Tahap pelayanan dalam panti

Pelayanan dalam panti dilakukan selama lebih kurang enam bulan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

1. Bimbingan fisik, bertujuan membentuk fisik yang sehat, kuat dan bugar. Bimbingan fisik ini dilakukan dalam bentuk kegiatan olahraga, senam bersama dan gotong royong yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Bimbingan sosial, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat. Pelaksanaan bimbingan sosial dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktek dengan materi bimbingan meliputi:
 - a. Pendidikan pancasila
 - b. Kewirausahaan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Etika sosial
 - e. Pendidikan agama
 - f. Kesehatan bagi remaja
 - g. Dinamika kelompok
3. Bimbingan mental, bertujuan membentuk mental yang kuat dan baik serta memberikan pemahaman yang komprehensif menyangkut konsepsi ajaran agama dengan tujuan bisa dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Bimbingan mental

keagamaan dilaksanakan dimalam hari dengan kegiatan dipusatkan di Musholla Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru (bagi yang beragama islam) dan bagi yang non islam bimbingan mental keagamaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada

4. Bimbingan keterampilan, bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam usaha mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Bimbingan ketrampilan dilakukan dalam empat jurusan yang dilaksanakan setiap hari senin s/d jum'at mulai jam 09.00 s/d 12.45 Wib. Adapun bentuk bimbingan keterampilan yng diberikan adalah:
 - a. Bimbingan keterampilan Otomotif
 - b. Bimbingan keterampilan Menjahit
 - c. Bimbngin keterampilan Las
 - d. Bimbingan keterampilan Tata Rias
5. Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan tambahan yang bertujuan untuk menggali dan mendalami minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang. Kegiatan ekstra kurikuler yang diberikan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai pekanbaru adalah:
 - a. Kesenian, yang meliputi band, rebana, organ tunggal, seni tari, vocal group

- b. Olahraga, meliputi volley ball, futsal, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja
 - c. komputer yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu
6. kegiatan pemagangan/praktek kerja lapangan merupakan sarana untuk lebih mendalami bimbingan keterampilan yang telah diberikan kepada siswa. Pemagangan ini dilaksanakan diakhir kegiatan yaitu sebelum siswa mengikuti evaluasi akhir (ujian) dalam bentuk pemagangan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diberikan kepada kelayan. Kegiatan pemagangan dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha/perusahaan.
- g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pengakhiran pelayanan yang diberikan didalam panti. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

 - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dalam bentuk ujian akhir panti secara tertulis
 - b. Mengembalikan kelayan kedaerah asal/instansi pengutus untuk dilakukan pembinaan lanjutan
 - c. Memberikan bantuan stimulant dalam bentuk paket stimulan sesuai dengan jurusan masing-masing
 - h. Tahap bimbingan lanjut

Tahap bimbingan lanjut, merupakan tahap untuk memantau perkembangan eks penerima pelayanan setelah kembali kedaerahnya/ lingkungan kerja dan tempat tinggalnya sekaligus mengevaluasi

sejauhmana keberhasilan pelayanan yang diberikan selama dipanti.

Adapun dasar hukum yang menguatkan terkait tentang Implementasi Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor. 6 Tahun 1974, tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang nomor. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 1988, Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1990, tentang kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 1990, tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak
6. Pedoman Penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Departemen sosial R.I
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
8. Standarisasi Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), Depsos RI tahun 2008

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.

Tabel 2. Data penerima manfaat PSBR angkatan 70 Tahun 2019

Kelompok jurusan	Jumlah siswa per jurusan	Rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin
a. Jurusan otomotif	24 orang	Laki-laki : 40 orang
b. Jurusan menjahit	17 orang	Perempuan : 30 orang
c. Tata rias	14 orang	
d. Teknik las	15 orang	
Jumlah	70 orang	

Sumber : Peksos Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai angkatan 72 tahun 2020

Adapun fenomena yang ditemukan dari penelitian ini yaitu ;

1. Masih kurangnya sarana dan Prasarana yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai. Tidak efektifnya belajar mengajar pada saat ini karena sarana Kelas yang sedang direnovasi sehingga siswa sulit untuk melakukan berbagai kegiatan didalam kelas sedangkan waktu pelayanan untuk siswa hanya enam bulan. Prasarana yang kurang di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai ini pada masing-masing jurusan masih kurangnya alat-alat Praktek untuk siswa sehingga siswa hanya mengetahui alat-alat standar saja. Sedangkan pada era sekarang ini sudah banyak alat-alat terbaru yang harus diketahui siswa pada masing-masing jurusannya.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan tidak dapat berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.
2. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

1. Guna teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu administrasi publik khususnya mengenai Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.
2. Guna praktiks yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam pelaksanaan implementasi Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.
3. Guna akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang implementasi Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Sebagai acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini dan untuk dapat mengetahui adanya Pelaksanaan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Rumbai” dalam menangani Remaja putus sekolah. Terlebih dahulu penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada rtelevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

a. Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan

dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik. Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan

dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan

menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong

kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

b. Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan pendekatan Etimologis atau dari segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata

tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, yaitu :

- a. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

“Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara, maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. “pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.

Terdapat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan menurut beberapa ahli, antara lain:

Menurut Syafiie (2005:56) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan perintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang

memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. (Pamudji, 2004 : 3)

Taliziduhu (2003:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai berikut :

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab

itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama; fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan publik.

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.

b. Tujuan Khusus

Seluruh pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia berkeinginan untuk mencetak kader Pamong praja (pimpinan pemerintahan dalam negeri), oleh karenanya para kader tersebut oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing dikirim dan dibiayai ke IPDN Departemen Dalam Negeri atau perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta, yang kesemuanya diharapkan

untuk memperoleh mata kuliah ilmu pemerintahan.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh UU Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Suryadi (1975 : 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu: *“Policy Implementation encompasses those actions by public*

or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan

pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 :

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 : 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif

kebijakan untuk mengatasi masalah

3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Winter (dalam Nugroho. 2007 : 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah)dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi,

dimamfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2004 : 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2004 : 31).

Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa

yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi

informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu

standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi

para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006 : 149) mengatakan untuk menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan terdapat empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan).

2. Sumberdaya

Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terdikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksananya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

4. Konsep Program

Program menurut Sukrisno adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Lembang, et.al(2012;1, <http://lepank.com>)

Serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dan praktik-praktik menurut Laswell, (dalam Edi Wibowo 2003;29). Tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak menurut Astin Ranney (dalam Edi wibowo 2003;29).

Sedangkan program menurut Jones adalah cara yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa

program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5. Konsep Pelayanan

Pelayanan dan pengabdian merupakan kata kunci yang akan selalu memberi motivasi dan kesadaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendahulukan kewajiban dari pada hak. Pengabdian dan pelayanan melahirkan kesediaan berkorban untuk negara dan masyarakat. Hal ini perlu dipegang teguh dalam melaksanakan tugasnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materil dan spritual yang kemudian memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Timbulnya pelayanan publik disebabkan oleh adanya kepentingan publik dimasyarakat. Pelayanan publik itu sendiri bukanlah sasaran suatu kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Peran pelayanan dalam proses itu adalah bertindak selaku katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena pelayanan berlaku sebagai katalisator itulah makanya peran pelayanan menjadi penting dalam suatu sistem kerja/kegiatan organisasi.

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang

lain sesuai haknya. (Moenir, 2002;16)

Defenisi pelayanan tersebut dimaksudkan dalam program pemerintah pusat mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang ada diRumbai kota pekanbaru ini guna untuk melayani siswa yang putus sekolah untuk dibina kembali diPanti ini agar masing-masing mempunyai kepandaian untuk bekal mereka kedepannya.

6. Konsep Sumber Daya Manusia

Untuk memahami pengertian sumber daya manusia (SDM). Dimana sumber daya manusia berasal dari kata Daya (Energi), daya dalam konteks sumber daya manusia adalah kekuatan dalam arti kemampuan (kompetensi) yang bersumber dari diri manusia yang mempunyai kemampuan untuk membangun, artinya “membangun”, melakukan kegiatan pembangunan yang sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Mampu membangun berarti mempunyai daya (Energi) untuk bekerja dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab. Semua itu mengandung makna bahwa tidak setiap manusia bisa diartikan sebagai sumber daya manusia. Hanya manusia yang mempunyai daya dalam arti kemampuan untuk maju positif itulah yang dapat disebut sumber daya manusia.

Menurut Nawawi (dalam Sedarmayanti, 2007:207) Sumber daya manusia merupakan potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material atau non finansial) didalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (*real*) secara fisik dan non fisik alam mewujudkan eksistensi organisasi.

Selanjutnya menurut Nawawi (dalam Sedarmayanti,2007;350) ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu :

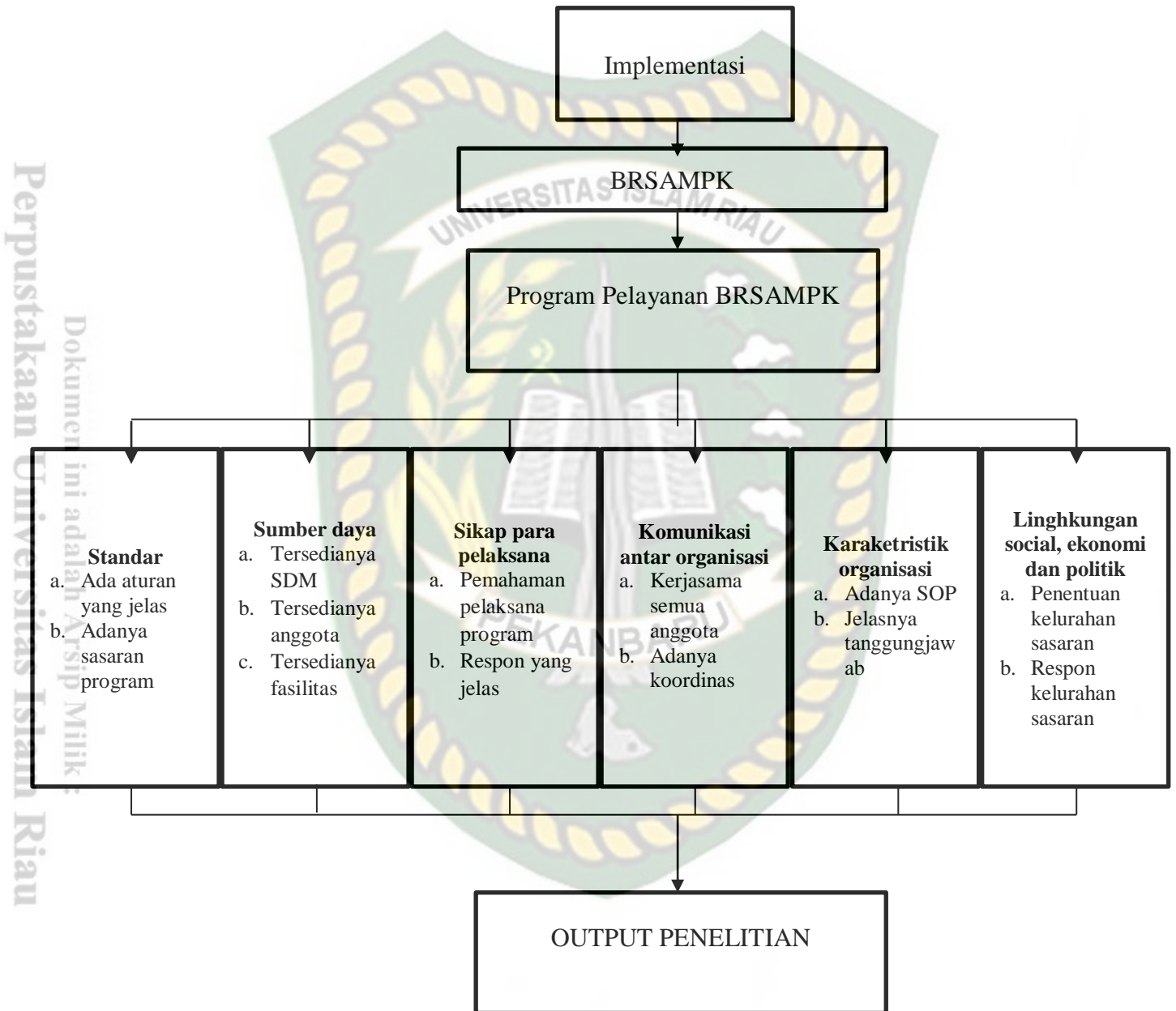
1. Manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan.
2. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Potensi yang merupakan aset yang berfungsi sebagai modal.

Sumber daya manusia dalam manajemen atau organisasi merupakan hal yang strategis dalam organisasi, karena pengaruh (impact). Pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat signifikan strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas organisasi dan manajemen sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

B. Kerangka Pikiran

Dari studi kepustakaan yang telah dibuat diatas maka selanjutnya disini penulis tarik kerangka pikiran dari penelitian ini yaitu :

Gambar 2: Kerangka pikiran mengenai Implementasi Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam Membina Anak Putus Sekolah



Sumber Data: Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep dan Operasional Variabel

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan

menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tertentu

2. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan
3. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.
4. Sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.
5. Karakteristik organisasi pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

6. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.
7. Disposisi atau sikap para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
8. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
9. Program yaitu suatu rencana yang telah ditetapkan oleh instansi terkait atau seseorang untuk dijalankan guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu
10. Program PSBR yaitu salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa yang putus sekolah
11. Implementasi merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan program pelayanan yang ada di PSBR.
12. Program Rehabilitas Sosial merupakan suatu proses kegiatan rehabilitasi anak putus sekolah yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan karena putus sekolah, sehingga dapat memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab

terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan dalam panti.

13. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) adalah lembaga pelayanan sosial profesional yang bertanggung jawab memberikan pelayanan sosial profesional kepada remaja putus sekolah yang kemungkinan terwujudnya kemandirian serta terhindarnya dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya.

D. Operasional Variabel

Berdasarkan dari uraian dan kerangka pikiran diatas maka selanjutnya disini akan disajikan operasional variabel dari penelitian ini yaitu:

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
<p>Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Nugroho,(2003;201)</p> <p>Implementasi kebijakan/program adalah cara agar sebuah kebijakan yang dapat mencapai</p>	<p>Implementasi program pelayanan Remaja Putus Sekolah</p>	<p>1. Standar dan sasaran kebijakan</p> <p>2. Sumber daya</p> <p>3. Sikap para pelaksana</p> <p>4. Komunikasi antar</p>	<p>a. Ada aturan yang jelas</p> <p>b. Adanya sasaran program</p> <p>a. Tersedianya SDM</p> <p>b. Tersedianya anggota</p> <p>c. Tersedianya fasilitas</p> <p>a. Pemahaman pelaksana program</p> <p>b. Respon pelaksana</p> <p>a. Kerjasama antar organisasi</p>

<p>tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui Formulasi kebijakan. Nugroho,(2005;158)</p>		<p>organisasi pelaksana</p> <p>5. Karakteristik organisasi pelaksana</p> <p>6. Lingkungan social, ekonomi dan politik</p>	<p>b. Adanya koordinasi</p> <p>a. Adanya SOP</p> <p>b. Jelasnya tanggungjawab</p> <p>a. Penentuan lokasi program</p> <p>b. Respon kelompok</p>
---	--	---	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informant, yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

Penulis memilih metode penelitian yang dianggap tepat yakni studi kasus. Studi kasus termasuk dalam metode penelitian pendekatan kualitatif, selain dari etnografi dan posedur interpretatif (Bogdan dan Biklen, 1990). Disini peneliti langsung melakukan penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, dengan mensurvei langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada

di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini dipilih dikarenakan kondisi yang terjadi dilapangan dan pengolahan data-data yang didapat dilapangan merujuk pada gambaran-gambaran umum yang terjadi secara realitas kepada masyarakat. Pelayanan dalam hal ini menjadi semakin terkupas hanya jika diinterpensikan melalui desain penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya desain ini menjadi tolak ukur untuk menganalisa data yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai kota Pekanbaru. Adapun alasannya dipilih lokasi penelitian ini adalah karena instansi ini merupakan tugas dari pemerintah pusat yang kemudian diberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat program, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anak yang putus sekolah. Sehingga pada instansi ini sangat dibutuhkan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai suatu program yang efektif dan efisien.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian yaitu :

Tabel 3.1. Key Informan dan Informan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Seksi Rehabilitasi Sosial	1	Key Informan
2.	Kepala Bagian Fungsional Pekerja Sosial	1	Key Informan
3.	Instruktur Keterampilan	3	Informan
4.	Siswa yang mengikuti program pembinaan	5	Informan

Sumber : Data Olahan, 2021

Informan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam Membina Remaja Putus Sekolah Peneliti mengambil informan dengan kriteria pada bagian Pelaksanaan Program pelayanan dan yang Mendapatkan Program Pelayanan yaitu Anak yang mendapatkan pelayanan didalam Panti angkatan 70.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Premier

Yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai Implementasi Pelayanan Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Kota Pekanbaru. Disini penulis langsung bertatap muka melalui wawancara (data yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai)

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti sejarah organisasi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan keadaan pegawai yang terkait dalam masalah penelitian ini sebagai pelengkap landasan penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004;186). Wawancara digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik. Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang peranan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam upaya pembinaan Remaja Putus Sekolah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada seksi Rehabilitasi Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru, instruktur keterampilan, serta anak yang dibina pada angkatan 72.

2. Observasi

Yaitu pengamatan dan percakapan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999;89). Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti guna mengungkap non partisipatif yaitu dalam melaksanakan pengamatan, peneliti tidak secara terus menerus dengan intens dan aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam rangka pembinaan Remaja Putus Sekolah pada bimbingan Sosial dan bimbingan keterampilan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari hasil arsip maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, baik itu data yang bersumber dari PSBR, photo dan surat-surat lainnya maupun dari buku karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2004;348)

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian mengenai Implementasi Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Dalam Membina Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru, direncanakan berakhir pada bulan Januari

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai dalam Membina Remaja Putus Sekolah

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																				Ket
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuesioner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

Sumber : Olahan Penulis

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Pekanbaru dikenal dengan sebutan Kota Bertuah yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Dan Harmonis yang merupakan slogan ibu kota bumi melayu lancing kuning dalam mencapai tatanan kota yang lebih baik. Pekanbaru yang di kenal sebagai kota melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya 2021. Pekanbaru mempunyai 2 pelabuhan di sungai siak, yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku, terminal Bandar Raya Payung Sekaki serta satu Bandar udara Sultan Kyarif Khasif II.

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Snapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun Payung Sekaki tidak begitu terkenal pada masanya dan masyarakat lebih mengenal dengan Snapelan.

Pada hari Selasa 21 Rajab 1204 atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesir Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), Negri Senapalan diganti nama “Pekan Baharu”. Sejak saat itu sebutan untuk senapelan ditinggalkan dan Pekan Baharu, mulai dipopulerkan. Pekan

Baharu kemudian berurubah nama menjadi Pekanbaru karna masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa yang digunakan sehari-hari.

Berdasarkan SK Kerajaan yaitu Besluit Van Inlanche Zelf Destuur Van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru mejadi bagian Kesultanan Siak den seburan distrik pada tahun 1931 Pekanbaru di maksukkan kedalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang *controlro*, setelah pendudukan Jepang tanggal 8 Maret 1942, pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan ketetapan Gubernur di Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut hamite atau kota besar. Setealah itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Kabupaten Pekanbaru berubah menjadi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dijadikan status Kota kecil dan status ini semakin disempurnakan dengan keluarnya UU No. 8 Tahun 1956, kemudian status kota Pekanbaru dinaikan dari kota kecil menjadi kota praja setelahnya UU No. 1 Tahun 1959. Berdasarkan Kemendagri No. Desember 52/144-25 tanggal 20 januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ linrang utara. Dengan ketinggian dan permukaan dari permukaan laut berkisar 50 meter. Pemukiman bagian Utara Landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru di perluas dati $+62,96 \text{ km}^2$ menjadi $+444,50 \text{ km}^2$ terdiri dari 6 Kecamatan dan 45

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran dan pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 Km².

Dengan meningkatkan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatkan kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup, maka di bentuklah Kecamatan baru dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut:

- Sebalah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebalah Barat : Kabupaten Kampar

Kota pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekannbaru menuju tahun 2020 adalah *“terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa”*. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut;

a. Pusat Perdagangan dan Jasa

Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakat yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan kota pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa dikawasan Sumatra

b. Pusat Pendidikan

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memberdayakan masyarakat agar berperan secara aktif meningkatkan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal

c. Pusat kebudayaan melayu

Merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru dalam memperetahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan dan menumbuh kembangkan budaya Melayu, diarahkan kepada tampil nya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan peridentitas adap melayu, serta nilai-nilai budaya melayu.

d. Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa

Merupakan cita-cita masyarakat akan dapat hidup di lingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kenersihan dan lingkungan.

Berdasarkan Iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat memperkokoh sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis seimbang dan selaras.

B. Gambaran Umum BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

1. Sejarah BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru didirikan pada tahun 1979, dibangun diatas tanah seluas 20.000 m². Pemberian kata “Rumbai” dibelakang BRSAMPK menunjukkan lokasi Balai yang berada di wilayah kecamatan Rumbai kota Pekanbaru.

Dalam perjalanannya, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali, yakni diawali pada awal pendirian Balai pada bulan Februari tahun 1979, diberikan nama Balai Karya Taruna (PKT) yang secara garis komando berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pada tahun 1986, PKT berubah nama menjadi Balai Penyantunan Anak (PPA). Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah kembali menjadi nama Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan selama enam bulan untuk satu angkatan, sebanyak 70 orang. Dengan demikian, dalam satu tahun BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memberikan pelayanan kepada 140 orang anak, yang terdiri dari dua angkatan, yaitu untuk periode Januari-Juni, dan Juli-Desember.

Sampai dengan bulan Januari 2021 sudah 71 (tujuh puluh satu) angkatan yang menerima pelayanan, dengan jumlah penerima manfaat yang dibina sebanyak 4.970 (empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh) orang. Dalam perekrutan penerima manfaat, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru melakukan kegiatan sosialisasi dalam seleksi kedaerah yang menjadi wilayah kerja BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Petugas sosialisasi dan seleksi melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas sosial setempat, aparat pemerintah setempat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya, dalam rangka perekrutan penerima manfaat di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru juga telah mengalami beberapa pergantian pimpinan/kepala Balai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Pimpinan Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru dari tahun 1979-2021

NO.	TAHUN	NAMA PIMPINAN	KET
	1	2	3
1	1979	Jusnir	PLT
2	1979	Sahril	PLT
3	1980 - 1984	Ismail Daulay	
4	1984 - 1990	Drs. Sabar Tambun	
5	1991	Kuradin Simanjuntak	PLT
6	1991 - 1994	Rustam A. Y, S.H.	
7	1994 - 1998	Anhar Sudin, BSW	
8	1999 - 2000	Drs.Uji Hartono	
9	2000 - 2001	Drs. Ahmad Fawzi	
10	2002 - 2005	Drs. Santoso Purnomo Siwi	
11	2005-2010	Drs. Erniyanto	
12	2010-2012	Drs. Syamsir Rony	
13	2012 - Sekarang	Sarino, S.Pd., M.Si	

Sumber : Profil BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru 2021

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990, Tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998, Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990, Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004, Tentang perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193MENKES-KESOS/III2000, Tentang Standarisasi Balai Sosial.
- k. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
- l. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial.
- m. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011, tentang Standarisasi Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- n. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 02/HUK/2012, tentang Taman Anak Sejahtera.

- o. Standarisasi Pelayanan Sosial RI Nomor 02/HUK/2012, tentang Taman Anak Sejahtera.
- p. Standarisasi Pelayanan Sosial Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja, Depsos RI tahun 2008.
- q. Standar Prosedur Operasional RPSA, Depsos RI Tahun 2009.

3. Visi dan Misi BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

a. Visi

“Terwujudnya kemandirian dan keberfungsian sosial remaja putus sekolah dalam masyarakat”

b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang professional dan proporsional didalam Balai
- b) Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan BRSAMPK Rumbai Pekanbaru
- c) Memberdayakan individu, kelompok, keluarga, lembaga sosial, dan jaringan kerja terkait, dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab sosialnya.
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosialnya.

4. Tujuan

Tujuan BRSAMPK Rumbai Pekanbaru adalah:

- a) Melakukan pembinaan terhadap remaja putus sekolah agar terhindar dari berbagai masalah sosial sebagai akibat dari putus sekolah dan terlantar.
- b) Mewujudkan kemandirian remaja putus sekolah atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri dalam memilih, menetapkan, dan memutuskan cara terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya.
- c) Mewujudkan kemampuan dan kekuatan remaja dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai.
- d) Memberikan pendampingan terhadap remaja putus sekolah yang mengalami permasalahan dalam menjalankan fungsi sosialnya masyarakat.

5. Tugas Pokok dan Fungsi BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

a) Tugas Pokok

Memberikan bimbingan bidang, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan bidang pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, bimbingan bidang lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyajian standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

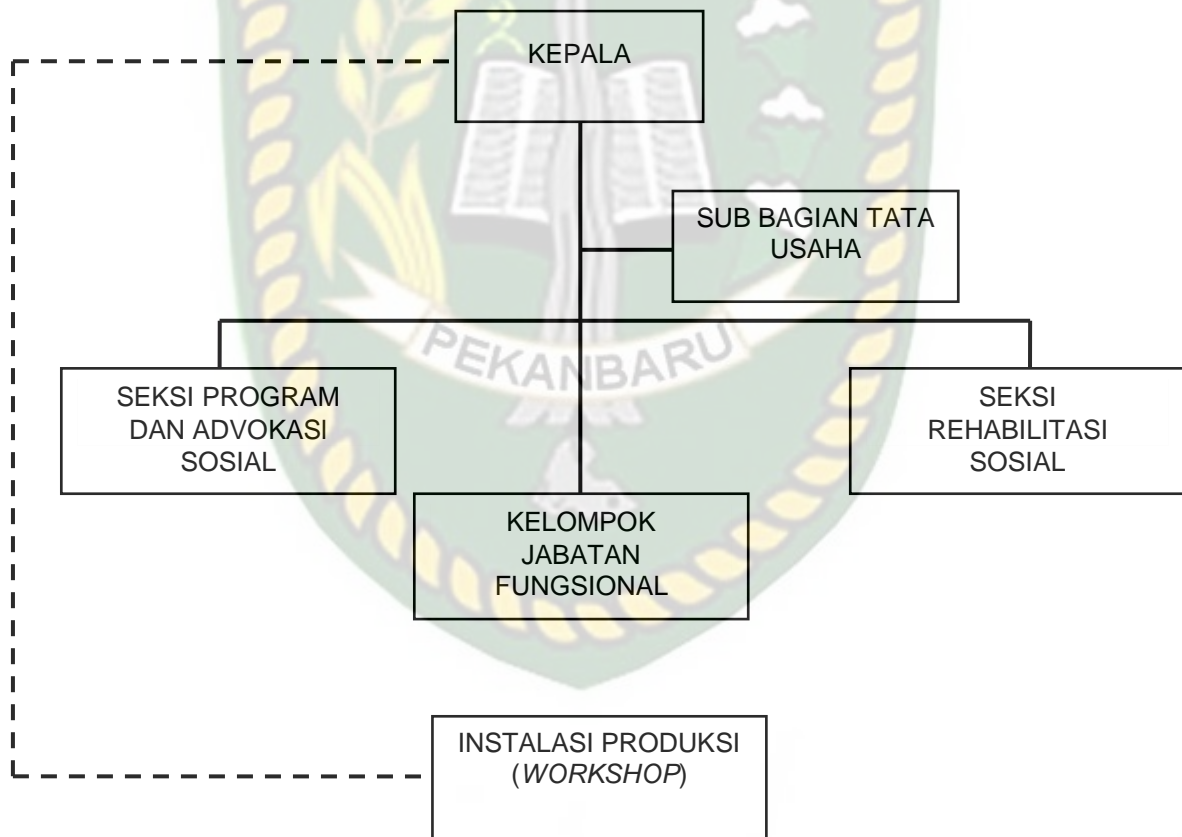
b) Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya, penyusunan standarisasi pelayanan, pelayanan rehabilitasi remaja putus sekolah, terminasi dan pembinaan lanjut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaksanaan pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam Balai, bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan.
- c. Pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan
- d. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan dengan Kementerian Sosial RI.

C. Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi



2. Uraian Tugas

a. Kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

- 1) Tugas Pokok

Melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

- a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan laporan.
- b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan.
- c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan bidang mental, sosial, fisik, dan keterampilan.
- d. Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi.
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

3) Uraian Tugas

- a. Melaksanakan persiapan, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan.
- c. Melaksanakan fungsi manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- d. Melaksanakan pengkajian, pemberian informasi, advokasi dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial di Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja Rumbai Pekanbaru.

- e. Mendelegasikan tugas/ wewenang kepada Pejabat Eselon IV.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Dunia Usaha.
- g. Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan kegiatan.
- i. Menerima rujukan dan penolakan klien yang tidak memenuhi persyaratan.
- j. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- k. Menyusun kebutuhan pegawai, kepangkatan, gaji dan pengembangan tenaga jabatan fungsional.
- l. Menyusun laporan seluruh kegiatan berkala.
- m. Kegiatan Tata Usaha.

b. Sub Bagian Tata Usaha

1. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perencana serta kehumasan.
2. Uraian Tugas
 - a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugaskegiatan kepada staf.
 - b. Membagi tugas/kegiatan kepada staf.
 - c. Melakukan persiapan bahan rencana kegiatan tahunan
 - d. Melakukan urusan surat-menyurat.

- e. Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat.
- f. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Balai.
- g. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran.
- h. Menghimpun dan merekap DP.3, DUK dan daftar hadir.
- i. Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN.
- j. Menyiapkan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta kenaikan berkala.
- k. Membuat LAKIP Balai.
- l. Menyiapkan bahan mutasi dan pembinaan pegawai.
- m. Melakukan pembahasan dan penyusunan anggaran.
- n. Menyiapkan bahan sanksi administrasi kepegawaian.
- o. Menyiapkan analisa kebutuhan pegawai.
- p. Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai.
- q. Menyiapkan laporan realisasi keuangan.
- r. Melakukan Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mengenai barang dan keuangan.
- s. Mengusulkan kepanitiaan perlengkapan.
- t. Menyiapkan analisa kebutuhan perlengkapan kantor dan asrama.
- u. Menyiapkan bahan permakanaan dan kebutuhan klien.
- v. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Balai.
- w. Menyiapkan bahan kehumasan.
- x. Menyiapkan bahan dokumentasi pameran, dan sosialisasi program.

- y. Melakukan tugas lain dari kepala Balai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Seksi Program dan Advokasi Sosial

1. Tugas Pokok

Melakukan penyusunan rencana dan program, pemberian informasi dan advokasi, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan rehabilitasi sosial.

2. Uraian Tugas

- a. Mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Membagui tugas/kegiatan kepada staf.
- c. Melakukan perumusan rencana kegiatan tahunan.
- d. Melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan.
- e. Melakukan pengkajian program, penyiapan standarisasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi.
- f. Melakukan penyiapan bahan program pendampingan yang memerlukan advokasi.
- g. Menyiapkan bahan panduan operasional Balai.
- h. Menyiapkan bahan panduan petugas pelayanan klien.
- i. Melakukan pendistribusian informasi ketentuan/peraturan/tata tertib setiap unit pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi.
- j. Melakukan identifikasi, registrasi, seleksi, dan penerimaan serta

penjelasan program kepada calon klien.

- k. Melakukan pendampingan penyesuaian bagi setiap klien yang terhambat selama mengikuti tahapan/proses rehabilitasi Balai.
- l. Melakukan penghimpunan dan pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan laporan.
- m. Melakukan penghimpunan, pengolahan perpustakaan.
- n. Melakukan penghimpunan, pengolahan, data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan.
- o. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Balai.
- p. Melakukan tugas lain dari atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seleksi Rehabilitasi Sosial

1. Tugas Pokok

Melakukan registrasi, observasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa perawatan, bimbingan bidang pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik, keterampilan, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan bidang lanjut.

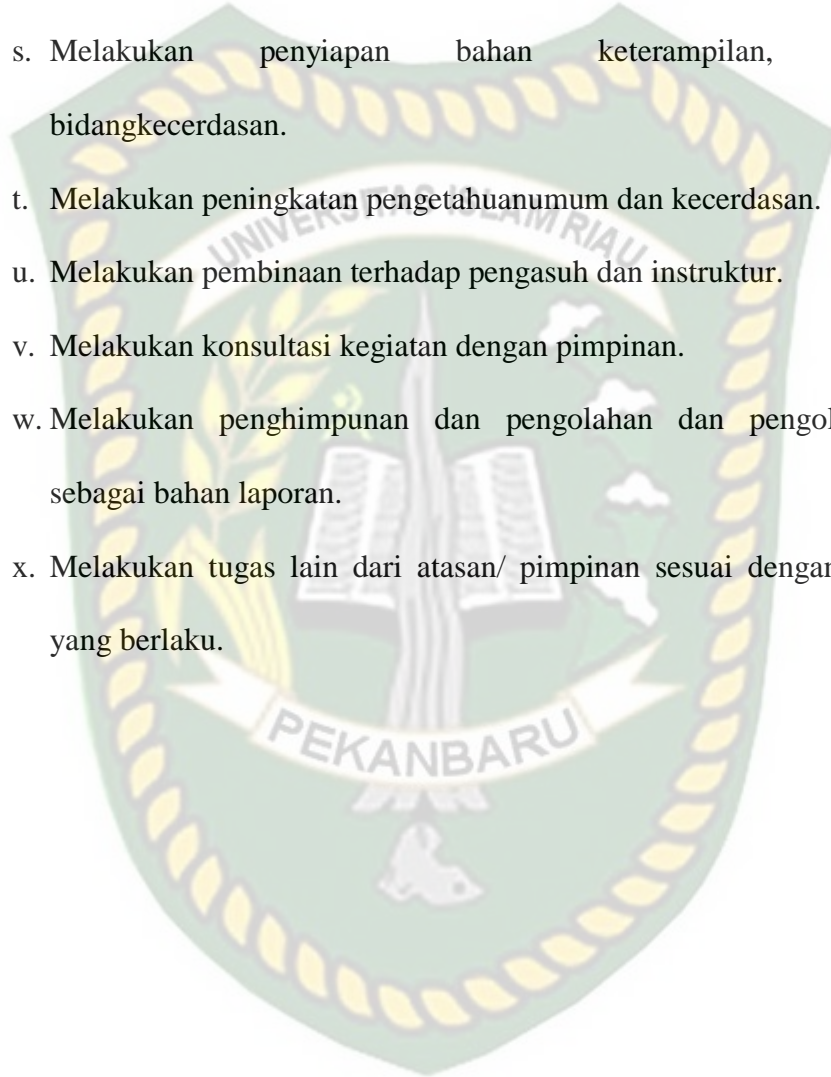
2. Uraian Tugas

- a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Membagi tugas kegiatan kepada staf.
- c. Melakukan persiapan rencana kegiatan bimbingan bidang fisik,

perawatan kesehatan, mental, sosial dan keterampilan serta mengkonsultasikan kepada kepala Balai.

- d. Melakukan koordinasi kegiatan tahunan dengsn unit terkait.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial termasuk perkembangan klien.
- f. Melakukan identifikasi, registrasi, seleksi daerah, dan penerimaan sertapenjelasan program kepada calon klien.
- g. Melakukan penyusunan kurikulum, kegiatan bimbingan bidang sosial, mental, fisik, kecerdasan dan keterampilan.
- h. Melakukan test awal untuk pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment)
- i. Melakukan test penelusuran minat dan bakat termasuk kemampuan IQ dan EQ.
- j. Melakukan penempatan klien kepada program.
- k. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait dalam rangka penyiapan resosialisasi dan bimbingan bidang lanjut.
- l. Melakukan magang klien pada perusahaan dan atau tempat usaha sesuai jesi keterampilan.
- m. Melakukan penyiapan bahan rujukan sesuai masalah.
- n. Melakukan konsultasi keluarga.
- o. Melakukan penyiapan bahan kelengkapan file klien.
- p. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler.

- q. Melakukan penyelenggaraan pengasramaan.
- r. Melakukan persiapan kegiatan UEP, KUBE, magang, wirausaha dan kunjungan keluarga.
- s. Melakukan persiapan bahan keterampilan, bimbingan bidangkecerdasan.
- t. Melakukan peningkatan pengetahuan umum dan kecerdasan.
- u. Melakukan pembinaan terhadap pengasuh dan instruktur.
- v. Melakukan konsultasi kegiatan dengan pimpinan.
- w. Melakukan penghimpunan dan pengolahan dan pengolahan data sebagai bahan laporan.
- x. Melakukan tugas lain dari atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BABV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan dan Hasil Penelitian Implementasi Program pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dalam Membina Remaja Putus Sekolah

Salah satu tugas pokok pemerintah menurut Sedarmayanti (2004: 9) adalah memajukan kesejahteraan umum dengan upaya mensejahterakan remaja putus sekolah terlantar. Dalam menjalankan tugas pokoknya pemerintahan memiliki fungsi-fungsi menurut Rasyid dalam Labolo (2000: 59) diantaranya fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, pemberdayaan dan fungsi pembangunan. Dalam hal menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan, pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada remaja putus sekolah dengan memberdayakannya.

Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja memiliki kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Sosial yang memiliki hak dan kewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja putus sekolah di dalam Balai, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sosial di Lingkungan Departemen Sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial remaja putus sekolah terlantar yang dimaksud dalam bentuk pembinaan yang bersifat bimbingan bidang, perlindungan serta pengembangan.

Untuk menjalankan programnya Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru memiliki Tugas Pokok yaitu memberikan pelayanan kepada remaja putus sekolah terlantar dari keluarga tidak mampu agar dapat terwujudnya kemandirian serta terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya. Salah satu fungsi Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru untuk menjalankan tugas pokok tersebut adalah pelaksanaan Program pelayanan kepada remaja putus sekolah di dalam Balai, bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan.

Peran Pelayanan yang dimaksud adalah Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak putus sekolah dengan bantuan/pertolongan yang dilakukan secara terarah, terencana dan sistematis yang menjamin dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme. Pelayanan tersebut mencakup bimbingan bidang sosial, mental, fisik dan bimbingan bidang keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh anak.

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus didirikan dengan tujuan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap remaja putus sekolah agar terhindar dari berbagai masalah sosial sebagai akibat dari putus sekolah, mewujudkan kemandirian remaja putus sekolah atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri dalam memilih, menetapkan, dan memutuskan cara terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya, mewujudkan kemampuan dan kekuatan remaja dalam mengembangkan berbagai potensi yang

dimiliki, yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan memberikan pendampingan terhadap remaja putus sekolah yang mengalami permasalahan dalam menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pembinaan yang diberikan tanpa dipungut biaya, biaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial ini berasal dari APBN dan untuk penyelenggaraan di Balai seluruhnya ditanggung oleh anggaran yang disediakan oleh APBN.

Bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan yang diterima diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pandangan serta taraf hidup mereka. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ini memberikan bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan yang bersifat fisik dan mental dengan tujuan agar penerima program pelayanan menjadi anak bertakwa, bermoral, berkarya, berpendirian dan mandiri. Setelah anak mendapatkan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, maka mereka disalurkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, pada usaha perbengkelan, salon, taylor dan tempat pengelasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat. Mereka juga diberikan alat-alat keterampilan sesuai dengan keterampilannya, jika mereka ingin bekerja secara mandiri ditempat asalnya.

Bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan yang diberikan dikondisikan dalam suasana dan proses yang menyenangkan, merangsang dan menantang anak sebagai penerima program pelayanan untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

Adapun bentuk bimbingan bidang sosial yang diberikan dalam Balai seperti pemahaman kewirausahaan, kewarganegaraan, etika sosial, kepemimpinan, kesehatan bagi remaja, dinamika kelompok dan konseling. Sedangkan bimbingan bidang keterampilan yang disediakan seperti keterampilan otomotif, keterampilan las, keterampilan menjahit dan keterampilan tata rias. Untuk uraian penjelasannya masing-masing bimbingan bidang sosial sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Standar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peraturan atau dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam kegiatan pelaksanaan program kampong keluarga berencana ini.

a. Aturan yang jelas

Suatu kebijakan atau aturan dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para

pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran (Nawawi, 2009:138).

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Bimbingan bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan bimbingan bidang sosial dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktek dengan materi bimbingan bidang meliputi kewirausahaan, kewarganegaraan, etika sosial, kepemimpinan, kesehatan bagi remaja, dinamika kelompok dan konseling.

Bimbingan bidang yang diberikan sudah optimal dilakukan akan tetapi terkendala dengan kemampuan peserta pelatihan yang tidak dapat memahami semua program bimbingan bidang yang diajarkan sehingga lama untuk beradaptasi menerima program yang diberikan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hilda, BA, Seksi Rehabilitas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Pelayanan dalam Balai berupa pembinaan dalam bimbingan bidang sosial dilakukan selama lebih kurang enam bulan. Kegiatan bimbingan bidang di lakukan dalam kelas maupun dalam praktek keseharian. Bimbingan bidang dalam kelas mengajarkan pemahaman tentang kewirausahaan, kewarganegaraan, etika sosial, kepemimpinan, kesehatan bagi remaja, dinamika kelompok dan konseling. Pengajaran dalam kelas dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari kamis. Pengajaran di luar kelas, seperti memberi teguran pada anak jika melakukan kesalahan, contohnya anak perempuan diwajibkan untuk berbusana yang sopan, tidak ketat sehingga menimbulkan keburukan. Maka jika dalam keseharian di jumpai anak-anak yang melanggar aturan, mereka di tegur dan di ajarkan bagaimana semestinya berpakaian yang baik. Sehingga di harapkan setelah tamat dari sini, anak dapat terbiasa dengan kebiasaan yang baik di sini.”

Pelaksanaan program pelayanan bimbingan bidang sosial harus berdasarkan standar pelayanan sosial BRSAMPK, Depos RI 2008 dimana Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus salah satunya harus memiliki jadwal pelaksanaan program dan melakukan pengawasan pelaksanaan program secara berkala. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus melaksanakan kegiatan bimbingan bidang sosial dalam kelas dan luar kelas. Jadwal kegiatan bimbingan bidang sosial dalam kelas setiap hari senin sampai dengan hari kamis, untuk masing-masing materi bimbingan bidang sosial dengan waktu yang di sediakan 90 menit per hari. Dalam satu hari dua jenis bimbingan bidang sosial yang di berikan. Metode pengajaran bimbingan bidang sosial dalam kelas yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan dan praktek.

b. Sasaran Program

Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana

pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Suharsono, 2010:56).

Kegiatan keseharian bimbingan bidang sosial diberikan oleh instruktur yang telah ditetapkan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan masing-masing kompetensi yang dimiliki instruktur. Standar kompetensi sumber daya manusia berdasarkan Standar Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008 dimana unsur fungsional untuk pekerja sosial memiliki persyaratan profesional seperti:

1. Pendidikan serendah-rendahnya SMTA.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam praktek pekerja sosial, baik melalui pendidikan dan atau pelatihan.
3. Memiliki pengalaman yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan sosial anak.
4. Mendapatkan sertifikasi sebagai pekerja sosial dari instansi yang berwenang.

Sumber daya manusia Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk instrukturkegiatan bimbingan bidang sosial seluruhnya telah memenuhi standar kompetensi sumberdaya manusia yang berdasarkan Standar Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008.Instruktur telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam prakteknyasebagai pekerja

sosial yang didapat melalui pendidikan maupun pelatihan yang disediakan oleh BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru. Mereka juga telah memiliki pengalaman yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 WIB di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Seluruh pekerja sosial untuk kegiatan bimbingan bidang sosial disini pendidikan nya minimal sudah SMTA. Kami juga sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendidik anak, yang kami dapat dari pelatihan yang disediakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Saya pribadi sudah memiliki pengalaman dalam hubungan untuk usaha kesejahteraan sosial anak yang saya dapat dari pendidikan Strata Satu.”

Proses pelayanan bimbingan bidang sosial menggunakan Silabus Bahan Ajar yang diterbitkan oleh Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan tujuan agar dapat memberikan arahan yang jelas dalam proses pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan

secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber daya dalam penelitian ini yaitu perangkat yang digunakan dari penggerak serta tersedianya fasilitas untuk menggerakkan pelaksanaan program kampong berencana ini.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu

pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Sumber daya maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang melakukan kegiatan usaha atau bekerja. Dalam hal kegiatan usaha atau kerja bisa dalam bentuk menjadi karyawan dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta, menjadi karyawan pada usaha orang lain, serta ada pula yang membuka atau menjalankan usahanya sendiri hal ini disebut wirausaha. Terkadang dalam hal beriwirausaha ada yang berhasil usahanya dan ada pula sebaliknya mengalami kerugian. Pemahaman kewirausahaan ini dimaksudkan agar anak yang telah mendapatkan keterampilan dapat mengaktualisasikannya dalam bentuk membuka usaha sendiri atau berwirausaha, jangan hanya mengharapkan pekerjaan dari orang lain.

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan disebut Wirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, diperlukan pengetahuan tentang

kewirausahaan sebagai dasar untuk dapat memahami manfaat maupun resikonya. Wirausaha yang berhasil akan tergantung bagaimana mempersiapkan diri secara matang untuk baik pengetahuan, mental, maupun keterampilan.

Melalui bimbingan bidang kewirausahaan diharapkan anak mampu memahami, menganalisa, dan pada akhirnya wirausaha akan menjadi pilihan hidup mereka sehingga diharapkan akan dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta akan mampu menciptakan lapangan kerja dimasa yang akan datang.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.STFungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang kewirausahaan ini diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak memiliki pengetahuan kewirausahaan setidaknya sebagai pengetahuan dasar agar anak tahu potensi pada dirinya maupun di lingkungannya. Bimbingan bidang kewirausahaan diharapkan dapat membuat anak yang telah mendapatkan pengetahuan keterampilan di BRSAMPK untuk mengembangkan diri dengan kemampuannya berwirausaha, sehingga tujuan BRSAMPK untuk dapat mewujudkan kemandirian anak dapat terwujud nantinya setelah anak tamat dari sini.”

Kegiatan bimbingan bidang kewirausahaan dijadwalkan hari Selasa dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Instruktur Akhmad Syahnuri, S.ST. Proses pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, simulasi/permainan dan evaluasi. Metode pembelajaran yang digunakan didalam kelas untuk kegiatan bimbingan bidang kewirausahaan yaitu diskusi, ceramah dan tanya jawab. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat

tulis, peralatan simulasi dan audio visual.

Metode pengajaran yang disampaikan oleh instruktur dinilai kurang baik untuk bimbingan bidang dinamika kelompok ini, selain terlalu banyaknya anak murid didalam kelas, terdapat juga masalah seperti ketidakhadiran instruktur. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan anak yang dibina, berikut hasil wawancara dengan anak yang sedang dibina angkatan 72 :

“Bimbingan bidang dinamika kelompok itu kurang menarik bagi Yatno kak, ada beberapa materi yang dimengerti, tapi banyak juga yang nggak ngerti kak. Bapak yang ngajar jarang masuk kak.” (Mahendra Yanto, 17th, Jurusan Las 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Kalau bimbingan bidang dinamika kelompok menurut Anis juga kurang menarik kak, ada beberapa materi yang susah dimengerti, apalagi didalam kelas ribut kak, kadang ada yang anis dengar, kadang juga nggak dengar kak.” (Anis Mardiana, 17th Jurusan Menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Bapak Tukmasari itu kurang menarik kalau ngajar kak, banyak materi dinamika kelompok yang Deva tidak mengerti, materi yang disampaikan itu, ada penjelasan-penjelasan yang susah dimengerti kak.” (Deva Aryanti, 16th Jurusan menjahit 17 Februari 2021 WIB di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ialah melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dari instruktur agar dapat menarik perhatian anak-anak, sehingga anak didik dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Kemudian masalah banyaknya anak-anak yang terdapat didalam kelas yang membuat suasana didalam kelas tidak kondusif dan memecah konsentrasi apabila anak-anak dalam keadaan ribut.

Hal ini seharusnya di imbangi dengan metode penyampaian materi yang baik oleh instruktur, agar bimbingan bidang dinamika kelompok ini berjalan sesuai dengan tujuannya. Bimbingan bidang dinamika kelompok yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh kepada pola pikir anak untuk dapat bekerja dan hidup tidak secara individu, melainkan hidup secara berkelompok. Anak didik dapat membentuk kelompok atau komunitas dengan baik, bersosialisasi dengan lancar kepada orang lain, dan dapat membantu sesama manusia apabila dengan benar mengikuti seluruh materi bimbingan bidang dinamika kelompok. Sehingga berdasarkan hal tersebut, bimbingan bidang dinamika kelompok pada bimbingan bidang sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dinilai cukup terimplementasi dalam mendidik anak.

b. Anggota

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak, Yustisia Dwi Putra, S.STFungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Bimbingan bidang sosial untuk kewirausahaan mengajarkan pada anak seperti pengertian kewirausahaan, jenis-jenis wirausaha, mengapa harus menjadi seorang wirausahawan dan banyak hal mengenai wirausaha. Kegiatan pemberian materi dilakukan didalam kelas dengan menyajikan materi dalam bentuk tampilan slide, sejalan dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya. Kegiatan setiap hari selasa pukul 15:00-16:30 WIB dalam waktu enam bulan. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru.”

Wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan BRSAMPK

“Rumbai” Pekanbaru angkatan 72 sebagai berikut:

“Iya kak ada bimbingan bidang kewirausahaan, Santi dapat kok bimbingan bidang kewirausahaan. Bimbingan bidang ini setiap hari selasa, dijadwal mulai dari jam 15:00-16:30 WIB diajarkan sama Pak Akhmad Syahnuri. (Santi Melinda, 9th Jurusan Tata Rias, 16 Februari 2021 di Ruang Fungsional Pekerja Sosial BRSAMPK Rumbai Pekanbaru).

“Ada bimbingan bidang kewirausahaan, belajarnya setiap hari selasa kira-kira dua jam lah kak dari jam 15:00-16:30 WIB, yang ngajarkan itu Pak Akhmad Syahnuri.” (Yuliana, 15th Jurusan Menjahit, 16 Februari 2021 di Ruang Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Belajar kewirausahaan ada kak, termasuk dibimbingan bidang sosial itu. Sekitar

90 menit belajarnya. Setiap hari selasa di jam kedua setelah belajar kewarganegaraan.

Unsur sumber daya manusia Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak dalam Balai memiliki standar rasio sumber daya manusia yang berdasarkan pada Standar Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depsos RI 2008. Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersifat bimbingan bidang yaitu bimbingan bidang sosial yang ditugaskan kepada pekerja sosial dengan rasio antara pekerja sosial dengan klien adalah 1:10. Standar rasio bertujuan agar pelayanan sosial pada anak dapat terfokus dengan maksimal untuk membina anak didalam

Balai, sehingga apa yang menjadi sasaran pembinaan dapat terwujud dengan maksimal dalam prosesnya.

Wawancara pekerja sosial sebagai instruktur bimbingan bidang sosial kepada Ibu Lisdawati, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru 16 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Pelayanan untuk bimbingan bidang sosial dilakukan didalam kelas, dengan jumlah instruktur satu orang mengajarkan tujuh puluh orang anak sekaligus, dengan arti seluruh anak dalam satu angkatan. Jadi untuk bimbingan bidang kewirausahaan ini dilaksanakan oleh satu orang pekerja sosial dengan Tujuh puluh orang anak didalam kelas. Akibatnya kami kesulitan untuk memaksimalkan pengajaran bimbingan bidang sosial pada anak dalam kelas. Memang solusi yang diberikan salah satunya mengajar dengan menggunakan pengeras suara, dengan harapan agar seluruh anak dalam kelas yang tujuh puluh orang ini dapat terdengar semua. Tapi, alat sebagai pendukung kegiatan ini keadaanya tidak baik, rusak-rusak. Jadi hal ini mengganggu kelancaran kami untuk mengajar didalam kelas. Selain itu media audio visual infokus menjadi barang yang langka untuk digunakan. Padahal dengan infokus kan dapat memperjelas penyampaian materi pada anak didalam kelas Tujuh puluh orang ini.”

Terlihat Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru antara pekerja sosial dengan anak dalam bimbingan bidang sosial kewirausahaan tidak sesuai dengan rasio sebagaimana standart dari Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja yaitu satu orang pekerja sosial dengan tujuh puluh orang anak. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan bimbingan bidang sosial kepada anak didalam Balai khususnya kewirausahaan.

Namun permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan bimbingan bidang kewirausahaan tidak menjadikan seluruh anak yang dibina tidak mendapatkan hasilnya. Salah satu keterangan dari anak yaitu Yanto, ia sudah cukup memahami pelajaran yang diajarkan dalam bimbingan bidang

kewirausahaan, namun Yanto juga membenarkan kondisi didalam kelas saat proses berlangsung dengan jumlah anak tujuh puluh dibanding satu orang instruktur menimbulkan ketidak mampuan instruktur untuk menyampaikan kepada anak-anak didalam kelas dengan maksimal dalam arti menyeluruh, hal ini tampak keadaan dalam kelas yang ribut karena tidak dapat dikontrol oleh instruktur itu sendiri. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sudah membuat solusi agar proses pembinaan bimbingan bidang sosial dalam kelas dapat berjalan dengan maksimal dengan salah satu menggunakan pengeras suara saat proses berlangsung, namun hal ini juga tidak menjadikan hasil yang lebih baik dalam perjalanannya, yang disebabkan alat itu sendiri dalam keadaan yang tidak layak untuk digunakan dan visual infocus yang dinilai oleh instruktur tidak dapat leluasa menggunakannya, dimana alat itu ketersediaannya masih langka. Selain itu suasana kelas yang tidak nyaman disebabkan panasnya udara karena kurangnya sarana pendingin ruangan yaitu kipas angin, yang dinilai oleh anak ketersediaannya tidak mencukupi.

Bimbingan bidang konseling berisikan materi konseling/psikologi yaitu pembahasan mengenai perkembangan diri dan kemandirian siswa secara efektif/kreatif dan dinamis serta memiliki kecakapan hidup untuk masa depan karir. Sehingga diharapkan dengan adanya bimbingan bidang ini akan dapat mempercepat perkembangan otak anak dalam berpikir dan mampu melakukan tindakan yang dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain disekitarnya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi

Putra,S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang konseling dilaksanakan untuk memberikan pandangan atau penilaian pada diri anak secara menyeluruh, sehingga anak, mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkembangannya, dan juga mampu mewujudkan perkembangan diri dan kemandirian secara optimal sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan makhluk sosial dalam berhubungan dengan manusia dan alam semesta.”

Bimbingan bidang konseling ini dilaksanakan pada hari Rabu pada pukul 15:00 hingga 16:30 WIB selama dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Ibu Putri Reno Sari, S.Psi. Proses pembelajaran bimbingan bidang konseling ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, diskusi dan tanya jawab. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, pengeras suara dan alat bantu visual seperti infocus.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra,S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 WIB di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Selanjutnya bimbingan bidang konseling ini sebenarnya dilakukan agar anak-anak dapat mengetahui seperti pengertian remaja (Misalnya batas usia remaja, tugas perkembangan remaja) dan membangun rasa percaya diri anak. Pemberian materi konseling juga dilakukan didalam kelas dengan menyajikan materi dalam bentuk tampilan slide, sejalan dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari Rabu jam 15:00-16:30 WIB. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Belajar tentang Psikologi gitu memang ada kak, setiap hari rabu jam 3 kak. Kalau nggak salah Danu yang ngajar itu ibu Putri kak.” (Danu Irawan, 14th Jurusan otomotif, 17 Februari 2021_14:50 WIB di Kantor Fungsional Pekerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Anis ikut bimbingan bidang konseling ini karena penting untuk perkembangan diri anis kak, apalagi belajar konseling itu supaya puji mandiri. Ibu Putri masuk bimbingan bidang hari Rabu jam 15:00 kak.” (Anis Mardiana, 17th Jurusan Menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Jarang juga ibu Putri itu masuk kak, padahal kan ada jadwalnya kak setiap hari Rabu jam 3 sampai setengah 5 sore. Jadinya Nopal nggak tahu mau ngapain kalau jadwal nya kosong kak.” (Nopal Pianda Saputra, 17th Jurusan Las, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Dalam bidang bimbingan bidang konseling Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus memiliki nilai standar rasio sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak dalam Balai yang lebih rendah dibandingkan dengan standar rasio Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008. Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersifat bimbingan bidang yaitu bimbingan bidang sosial yang ditugaskan kepada pekerja sosial dengan rasio antara pekerja sosial dengan klien adalah 1:10. Standar rasio 1:10 yang telah ditetapkan tersebut seharusnya diikuti agar tujuan pembelajaran pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dapat berjalan dengan baik dan benar, khususnya dalam bidang bimbingan bidang konseling ini.

c. Fasilitas

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III (Nawawi, 2009:138) yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kehadiran Instruktur dibutuhkan oleh anak untuk mendapatkan pelayanan

bimbingan bidang sosial khususnya kewirausahaan, kehadiran instruktur untuk memberikan pengajaran didalam kelas tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dimana untuk bimbingan bidang kewirausahaan mstrukturnya jarang hadir.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai kemampuan instruktur dalam bidang bimbingan bidang kewirausahaan, diperoleh kinerja dari instruktur yang tidak memuaskan terhadap bimbingan bidang kewirausahaan yang dilakukan. Materi-materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dapat dimengerti oleh anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Bimbingan bidang kewirausahaan yang telah dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus menghasilkan pola pikir anak yang lebih memahami pentingnya berwirausaha untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian anak didik juga mengetahui jenis-jenis usaha yang sedang berkembang pada saat sekarang ini dan dapat mereka contoh apabila mereka telah mampu untuk mendirikan usaha. Meskipun terdapat beberapa permasalahan teknis dan permasalahan pada instruktur pembimbing selama proses bimbingan bidang berlangsung, bimbingan bidang kewirausahaan dapat menghasilkan jiwa wirausaha muda yang dapat bersaing, sehingga bimbingan bidang kewirausahaan dinilai cukup terimplementasi dalam bimbingan bidang sosial anak peserta didik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Wawancara pekerja sosial kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST,

FungsionalPekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Bimbingan bidang konseling yang selama ini dilakukan dengan instruktur Ibu Putri Reno Sari, bimbingan bidang itu dilaksanakan didalam kelas , tetapi ada juga bimbingan bidang dilakukan di asrama untuk menanyakan masalah yang terjadi pada anak. Ibu Putri juga mengeluhkan soal anak-anak yang tidak bisa di atur, apalagi masalah ribut. Karena ribut itu Ibu Putri tidak bisa konsentrasi mengajar konseling dikelas. Bimbingan bidang konseling dilakukan setiap hari Rabu jam 15:00 hingga 16:30 WIB. Permasalahan bimbingan bidang ini sama halnya dengan bimbingan bidang lain yang terdapat di BRSAMPK ini, yaitu masalah jumlah murid yang terlalu banyak.”

Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja“Rumbai” Pekanbaru memiliki standar antara instruktur dengan anak dalam bidang bimbingan bidang konseling tidak sesuai dengan standar rasio yang telah ditetapkan yaitu satu orang instruktur dengan seratus orang anak. Tindakan lain untuk mencegah tidak lancarnya bimbingan bidang konseling di BRSAMPK “Rumbai” yang selama ini dilakukan didalam kelas, telah dilaksanakan juga tindakan dengan melaksanakan bimbingan bidang konseling didalam asrama. Dengan tindakan tersebut, diharapkan permasalahan yang terjadi pada pribadi anak dapat diselesaikan dengan baik.

Hal tersebut dibenarkan oleh anak yang mendapatkan bimbingan bidang konseling, hasil wawancara sebagai berikut:

“Selama ini kalau bimbingan bidang konseling yang dilakukan didalam kelas memang kurang Edi perhatikan kak, dalam kelas itu ribut. apalagi suara ibu Putri kecil.” (Edi Purwanto,18th, Jurusan otomotif, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Yanto ikut ribut juga kalau belajar konseling dikelas kak, memang ibu itu pakai pengeras suara, tapi karena hampir semua teman-teman ribut jadinya nggak dengar suara ibu itu.” (Mahendra Yanto, 17th Jurusan las, 17

Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Belajar konseling itu juga ada di asrama kak, ibu itu masuk untuk menanyakan masalah yang ada kak. Elvis pernah punya masalah dengan teman kak, tapi setelah cerita dengan ibu, ibu kasih solusi kak.” (Elvis Ramadhan, 17th Jurusan Las, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Nggak ngerti sama sekali belajar psikolog itu kak, udah suara ibu itu kecil, teman-teman ribut, jadi nggak ada gunanya Santi belajar konseling didalam kelas itu kak. Tapi konseling ada kegiatan didalam asrama juga kok. Nanti ada kalanya instruktur datang keasrama menanyakan berbagai masalah yang tidak mampu kami selesaikan sendiri dan dicarikan solusinya sama instruktur kak”. (Santi Melinda, 9th Jurusan Tata Rias 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Untuk setiap bimbingan bidang di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus memiliki permasalahan yang sama yaitu permasalahan banyaknya anak murid yang memenuhi kelas. Penuhnya kelas bimbingan bidang konseling ini mengakibatkan proses belajar mengajar yang dilakvikan oleh instruktur tidak optimal. Namun permasalahan ini seharusnya dapat dicarikan solusinya. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sudah membuat solusi agar proses pembinaan bimbingan bidang sosial dalam kelas dapat berjalan dengan optimal dengan salah satu menggunakan pengeras suara saat proses berlangsung, namun hal ini juga tidak menjadikan hasil yang lebih baik dalam perjalanannya, yang disebabkan alat itu sendiri dalam keadaanyang tidak layak untuk digunakan dan visual infocus yang dinilai oleh instrukturtidak dapat leluasa menggunakannya.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

a. Adanya SOP

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif (Nawawi, 2009:136).

Organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna adalah manusia. Manusia fitrahnya sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa ada manusia yang lain. Dikarenakan manusia itu sendiri memerlukan interaksi sesamanya. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam satu komunitas yang disebut masyarakat. Dalam masyarakat ini manusia dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan serta keahlian yang dimilikinya. Dalam bimbingan bidang kewarganegaraan ini diterangkan manusia itu sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengerti dan memahami peran mereka dalam masyarakat dilingkungannya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang kewarganegaraan ini diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat mengetahui, mengerti dan memahami konsep-konsep dasar dalam pendidikan kewarganegaraan dan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kelak ketika sudah tamat dari BRSAMPK ini.”

Kegiatan bimbingan bidang kewarganegaraan dijadwalkan hari Selasa dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Instruktur Tien Septemberiawati, S.ST. Proses pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, simulasi/pemmainan dan evaluasi. Metode pembelajaran yang digunakan didalam kelas untuk kegiatan bimbingan bidang kewarganegaraan yaitu ceramah,

tanya jawab dan permainan. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, peralatan simulasi dan audio visual.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Bimbingan bidang sosial untuk kewarganegaraan mengajarkan pada anak seperti identitas diri mereka sebagai individu, bagaimana memahami masyarakat, macam-macam norma dan segala sanksinya, dan cara berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan pemberian materi dilakukan didalam kelas dengan menyajikan materi dalam bentuk tampilan slide, sejalan dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya. Kegiatan setiap hari Selasa pukul 13:30-15:00 WIB dalam waktu enam bulan. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 sebagai berikut:

“Ada kak bimbingan bidang kewarganegaraan, sepertinya semua anak dapat lah kak. Bimbingan bidang kewarganegaraan hari Selasa siang dijadwal jam 13:30-15:00 WIB. Instrukturnya itu Ibu Tien Septemberiawati.” (Edi Purwanto, 18th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Setahu saya bimbingan bidang kewirausahaan semua anak disini dapat kak, termasuk Santi sendiri. Pelajaran kewirausahaan itu termasuk dalam bimbingan bidang sosial. Instrukturnya Ibu Tien Septemberiawati, setiap hari Selasa jam 13:31-15:00 WIB didalam kelas belajarnya kak.” (Santi Melinda, 19th Jurusan Tata Rias, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Bimbingan bidang kewarganegaraan juga dilaksanakan dalam kelas

dengan jumlah anak Tujuh puluh orang dengan Instruktur satu orang. Sehingga pemahaman kewarganegaraan tidak dapat dipahami oleh anak dengan baik. Padahal standarrasio sumber daya manusia yang berdasarkan pada Standar Pelayanan SosialBRSAMPK, Depos RI 2008 antara pekerja sosial dengan klien adalah 1:10. Standarrasio bertujuan agar pelayanan sosial pada anak dapat terfokus dengan maksimal untuk membina anak didalam Balai, sehingga apa yang menjadi sasaranpembinaan dapat terwujud dengan maksimal dalam prosesnya. Berikut wawancara pekerja sosial sebagai instruktur bimbingan bidang sosial kepada Ibu Lisdawati, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 16 Februari2021_09:00 WIB di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang kewarganegaraan termasuk bimbingan bidang sosial juga. Jadi sama saja seperti bimbingan bidang kewirausahaan. Belajarnya dalam kelas dengan jumlah instruktur satu orang mengajarkan Tujuh puluh orang anak sekaligus, dengan arti seluruh anak dalam satu angkatan. Jadi untuk bimbingan bidang kewarganegaraan ini dilaksanakan oleh satu orang pekerja sosial dengan tujuh puluh orang anak didalam kelas. Akibatnya sama, kesulitan untuk memaksimalkan pengajaran bimbingan bidang sosial pada anak dalam kelas. Solusi nya sama berusaha mengajar memakai pengeras suara dan Infokus dengan permasalahan yang sama dengan penjelasan Ibu sebelumnya.”

Hal tersebut dibenarkan oleh anak yang mendapatkan bimbingan

bidang kewarganegaraan, hasil wawancara sebagai berikut:

“Enggak tau kak apa itu kewarganegaraan dan pelajaran yang dipelajari selama bimbingan bidang kewarganegaraan didalam kelas. Karena belajarnya dalam kelas yang ramai kak, seratus orang kami dalam tu. Udah seramai itu ribut lah jadinya kak, mana instruktornya hanya satu orang saja lagi. Jadi apa yang dijelaskan pun sudah tidak dengar. (Santi Melinda, 9th, Jurusan Tata Rias 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Kewarganegaraan itu belajar tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat dan peraturannya. Segitu saja tahu nya kak, itu pun tahunya karena baca dari modul yang dikasi. Kalau penjelasan didalam kelas, memang sama sekali tidak ngerti. Kelas nya ribut kak, karena kami belajar Tujuh puluh orang, udah gitu gurunya hanya satu, menjelaskan pakai pengeras suara tetap saja tidak kalah dengan ributnya didalam kelas. Jadinya tidak tau kak apa saja yang dijelaskan didalam kelas.” (Danu Irawan, 14th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Apa yang disampaikan didalam kelas memang kurang dapat dimengerti kak, karena kelas yang anak nya ramai sampai Tujuh puluh orang, sedangkan instruktur nya hanya satu orang. Jadi tidak bisa semua anak dikelas dapat dikontrol, akibatnya kebanyakan anak sibuk dengan kesibukan masing-masing, ribut jadinya. Jadi memang Nopal tidak mengerti apa yang dijelaskan, serasa sia-sia saja belajar kewirausahaan dengan keadaan kelas yang seperti itu. Nopal belajar dari modul yang dikasih saja kak biar dapat menjawab waktu ujian.” (Nopal Pianda Saputra, 17th, Jurusan Las, 15 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Pemasalahan yang ditemukan didalam kegiatan bimbingan bidang kewarganegaraan juga sama dengan bimbingan bidang sebelumnya yaitu kewirausahaan, dimana anak-anak tidak mendapatkan hasil maksimal dari bimbingan bidang kewarganegaraan dalam kelas yang disebabkan kegiatan dilakukan dengan tujuh puluh orang anak sekaligus dengan instruktur yang menyampaikan hanya satu orang.

b. Jelasnya tanggungjawab

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing - masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini membuat instruktur tidak dapat mengontrol seluruh anak yang beradadalam kelas, akibatnya timbul kesibukan masing-masing dari anak, sehingga penyampaian instruktur tidak dapat diterima oleh seluruh anak dengan baik. Instruktur hanya dapat mengontrol anak yang berada dekat dengan nya didalam kelas, hasilnya anak-anak yang berada jauh darinya tidak dapat dikendalikan untuk diberikan pemahaman kewarganegaraan. Solusi penyampaian pemahaman kewarganegaraan dengan bantuan alat pengeras suara dan infocus tidak menjadikan kegiatan bimbingan bidang kewarganegaraan jauh lebih baik diterima anak dalam proses kegiatannya didalam kelas.

Namun permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan bimbingan bidang kewarganegaraan tidak hanya karena Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tidak memenuhi Standar Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008. Kehadiran Instruktur dibutuhkan oleh anak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan bidang kewarganegaraan, kehadiran instruktur untuk memberikan pengajaran didalam kelas tidak sesuai dengan jadwalyang ditetapkan. Sama hal nya dengan bimbingan bidang kewirausahaan instruktur nya jarang hadir.

Instruktur dituntut untuk dapat memberikan pembinaan yang maksimal kepada anak, agar apa yang menjadi tujuan pembinaan dapat terwujud. Hasil

pengamatan dilapangan berdasarkan keterangan anak yang mendapatkan pembinaan, khususnya bimbingan bidang kewarganegaraan dapat dinilai instruktur tidak memiliki kemampuan yang dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka ketika kegiatan sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses bimbingan bidang kewarganegaraan, diperoleh beberapa masalah yang menyangkut kurangnya fasilitas bimbingan bidang dan kurang disiplinnya instruktur pembimbing selama proses bimbingan bidang berlangsung. Namun hasil yang dapat diberikan dari bimbingan bidang kewarganegaraan ini sangat mempengaruhi gaya hidup pribadi maupun gaya hidup bermasyarakat anak didik apabila telah menyelesaikan proses bimbingan bidang di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Kemudian dari bimbingan bidang kewarganegaraan ini anak peserta didik juga dapat memperoleh norma-norma yang benar dan dapat diterima didalam kehidupan masyarakat serta dapat mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu bimbingan bidang kewarganegaraan ini diperlukan untuk mendidik pola pikir dan gaya hidup yang lebih baik untuk kehidupan anak, sehingga bimbingan bidang kewarganegaraan dinilai cukup terimplementasi dalam proses bimbingan bidang sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Metode pengajaran didalam kelas yang dinilai kurang efektif akibat terlalubanyak anak yang belajar didalam kelas. Hal ini terbukti berdasarkan keterangananak yang dibina, berikut hasil wawancara dengan anak yang sedang dibinaangkatan 72 :

“Rasanya bimbingan bidang konseling ini memang setiap hari harus dipelajari kak, kalau cuma didalam kelas menurut Deva kurang aja belajar konseling itu kak.” (Deva Aryanti, 16th Jurusan Menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Sebenarnya belajar psikologi itu menarik bagi Yuliana kak, soalnya dengan belajar itu kita bisa baca pikiran orang lain kan kak, kita bisa ngerti masalah orang lain itu, tapi kalau belajar dalam kelas itu buat Yuli bosan kak, ribut betul dalam kelas tu.” (Yuliana, 15th, Jurusan Menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Nopal kalau belajar dalam kelas itu nggak ngerti kak, sama dengan bimbingan bidang lain yang kelasnya ribut, tapi kan konseling ini ada juga didalam asrama, jadinya ngerti juga lah tujuan konseling ini kak.” (Nopal Pianda Saputra, 17th, jurusan Las, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ialah melakukan pembinaan kepada anak-anak agar berperilaku sopan dan tertib didalam kelas, agar proses belajar mengajar dapat dilakukan secara optimal. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan pengarahan secara berkala kepada anak dan di imbangi dengan metode penyampaian bimbingan bidang oleh instruktur yang lebih baik. Sehingga apabila seluruh materi dapat disampaikan dengan baik, hasil yang diharapkan dari perkembangan pribadi anak yaitu anak dapat menyelesaikan permasalahan pribadi maupun kelompok serta orang lain disekitarnya dengan baik, kemudian anak juga dapat mengerti perilaku dan sifat serta kelebihan dan kekurangan pribadinya, maupun orang lain disekitarnya. Bimbingan bidang konseling ini sangat baik untuk membuka pola pikir anak, sehingga anak dapat berpikir secara luas untuk

mencapai masa depannya yang lebih cerah. Oleh karena itu, bimbingan bidang konseling di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dinilai cukup terimplementasi dalam proses bimbingan bidang sosial terhadap anak didik.

4. Komunikasi antar Pelaksana

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

a. Kerjasama Semua Anggota

Komunikasi bertujuan untuk menjalin kerjasama dan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan

yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) (Nawawi, 2009:138).

Tidak diragukan lagi bahwa moral merupakan kunci keberhasilan setiap insan didalam kehidupan sehari-hari sebagai individu maupun dalam konteks sebagai anggota masyarakat. Semakin luhur moral suatu masyarakat semakin baik pulalah tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Sebuah lembaga bernama “*Emotion Quotient Inventory (EQI)*” telah melaksanakan pengumpulan data orang-orang yang sukses di muka bumi ini telah menyajikan hasil penelitian bahwa kecerdasan intelektual hanya memberi pengaruh 6%-20% didalam meraih sukses, sedangkan 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau yang lebih dikenal saat ini dengan Emosional Quotient (EQ) tidak lain adalah nilai-nilai luhur moralitas seperti kejujuran, kedermawanan, kreativitas, disiplin, keadilan, keterbukaan dan rendah hati.

Bimbingan bidang etika sosial mencakup beberapa pembahasan dan pengenalan serta pemahaman tentang etika, moral, dan norma. Melalui pembelajaran etika sosial sejak dini, dengan maksud mengupayakan meletakkan sendi-sendi sosial dan moral dengan satu harapan siswa dapat menyelesaikan segala masalah penting dan dapat bergaul dengan baik ditengah masyarakat. Berbudhi pekerti luhur berdasarkan keimanan, taqwa, persaudaraan, kasih sayang, tidak mementingkan diri sendiri, sabar, bijaksana dan seimbang dunia akhirat.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST , Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang etika sosial memberi pemahaman kepada anak agar anak dapat mengetahui, mengerti dan memahami pentingnya etika, khususnya dalam menghadapi berbagai nilai dan konsep hidup ditengah-tengah keluarga dan masyarakat serta pengaruh dari budaya asing.”

Kegiatan bimbingan bidang etika sosial dijadwalkan hari Senin dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Instruktur Lisdawati, S.Sos. Proses pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, simulasi/permainan dan evaluasi. Metode pembelajaran yang digunakan didalam kelas untuk kegiatan bimbingan bidang kewarganegaraan yaitu ceramah, tanya jawab dan permainan praktek. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, peralatan simulasi dan audio visual.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada instruktur bimbingan bidang etika sosial Ibu Lisdawati, S.Sos. pada 16 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Iya saya sendiri instruktur bimbingan bidang etika sosial di BRSAMPK ini. Bimbingan bidang etika sosial ini mengajarkan macam-macam jenis etika, seperti etika berbicara, etika makan dan minum, etika mengucapkan salam, etika memasuki rumah, etika bergurau, etika menjenguk orang sakit, etika melayat, dan banyak hal lainnya. jadwal bimbingan bidang ini hari senin jam 13:30-15:00 WIB setelah anak-anak makan siang.”

Wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72

sebagai berikut:

“Bimbingan bidang etika sosial ada kok kak, Nopal pernah dapat bimbingan bidang dari Ibu Lisdawati, Ibu Lisdawati mengajar pada hari senin jam 13:30 kak.” (Nopal Pianda Saputra, 17th Jurusan las, 15 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Pada Bimbingan bidang Etika SosialHardi hadir terus kok waktu bimbingan bidangnya kak, bimbingan bidang etika sosial itu setiap hari senin dengan Ibu Lis sesudah waktu makan siang kak.” (M. Hardiansyah, 16th Jurusanotomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersifat bimbingan bidang yaitu bimbingan bidangsosial yang ditugaskan kepada pekerja sosial dengan rasio antara pekerja sosialdengan klien adalah 1:10. Hal ini berdasarkan standar rasio sumber daya manusiayang telah ditetapkan oleh Departemen Kementerian Sosial. Berikut wawancarapekerja sosial sebagai instruktur bimbingan bidang etika sosial yaitu Ibu Lisdawati, S.Sos16 Desember 2012 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Kebetulan saya sendiri yang mengajar bimbingan bidang etika sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ini dik. Saya cukup kewalahan dengan bimbingan bidang yang hanya dilakukan selama satu minggu sekali dengan waktu belajar yang hanya kira-kira 90 menit dan dengan jumlah anak-anak yang tidak sesuai dengan kapasitas suara saya. Makanya saat mengajar dalam kelas itu saya menggunakan pengeras suara, itupun tidak efektif untuk membuat anak-anak mengerti dan paham dengan apa yang saya sampaikan dik. Mana alat pengeras suara nya rusak-rusak dik, tambah lagi infokus itu menggunakannya susah.”

Permasalahan yang terjadi pada bimbingan bidang etika sosial ini lebih kepadafasilitas mengajar yang kurang memadai dan kapasitas anak-anak yang terlalubanyak jika bimbingan bidang hanya dilakukan oleh satu orang instruktur.

Beberapafasilitas yang kurang memadai untuk mengajar bimbingan bidang etika sosial ini sepertipengeras suara yang sering tidak aktif, kemudian lamanya penyiapan infocusuntuk proses mengajar. Seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan denganperencanaan penggunaan fasilitas yang baik agar proses bimbingan bidang etika sosialdapat berjalan dengan lancar.

b. Adanya Koordinasi

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103).

Bimbingan bidang etika sosial dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku serta moral anak dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Bimbingan bidang etika sosial mi memberi pelajaran yang bemiilai positif untuk kehidupan anak, sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih baik untuk anak tersebut dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu bimbingan bidang etika sosial yang telah dilaksanakan dalam proses bimbingan bidang sosial dinilai cukup terimplementasi untuk mendidik anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Tidak semua orang dapat memimpin suatu komunitas dan ada pula yang bisa serta mempunyai jiwa memimpin. Kepemimpinan merupakan pusat dari segala pusat kegiatan masyarakat. Karena dalam masyarakat, individu dapat mengarahkan dan menggerakkan individu yang lain hal ini disebut pimpinan. Seorang pimpinan mempunyai sifat dan sikap yang mencerminkan ia seorang pimpinan, dalam hal memimpin suatu komunitas, memutuskan suatu kebijakan dan sebagainya yang menyangkut hal kepemimpinan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Untuk bimbingan bidang kepemimpinan, bimbingan bidang ini dilakukan agar anak-anak mengetahui, terus mengerti dan paham dengan konsep-konsep dasar bagaimana berperilaku kepemimpinan yang baik. Kemudian dengan bimbingan bidang kepemimpinan ini anak-anak juga dapat memiliki kemampuan untuk menerapkan kepemimpinan itu dalam kehidupan sehari-harinya, baik untuk memimpin dirinya sendiri, maupun untuk kelompok serta masyarakat disekitarnya.”

Proses pembelajaran bimbingan bidang kepemimpinan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, simulasi/ permainan dan evaluasi. Bimbingan bidang kepemimpinan ini dilaksanakan pada hari Senin selama dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Instruktur Budi Prayitno, S.ST. Metode pembelajaran bimbingan bidang kepemimpinan yang digunakan didalam kelas yaitu diskusi, ceramah dan tanya jawab. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, peralatan simulasi dan audio visual.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang kepemimpinan ini dilakukan agar anak-anak mengerti pentingnya berperilaku kepemimpinan yang baik dan benar baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk memimpin orang lain. Pemberian materi juga dilakukan didalam kelas dengan menyajikan materi dalam bentuk tampilan slide, sejalan dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari senin pukul 15:00-16:30 WIB dalam waktu enam bulan. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Danu juga ikut bimbingan bidang kepemimpinan kak. Bimbingan bidang kepemimpinan ini dilaksanakan di hari Senin kak, jadwalnya jam 3 sore setelah bimbingan bidang etika sosial. Gurunya Bapak Budi Prayitno.” (Danu Irawan, 14th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Iya kak, bimbingan bidang kepemimpinan memang diadakan hari senin aja kak, setiap jam 3 sore di kelas dengan Bapak Budi Prayitno. Kalau nggak salah Anis kurang lebih 2 jam bimbingan bidangnya itu kak.” (Anis Mardiana, 17th Jurusan Menjahit, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Santi ikut terus bimbingan bidang kepemimpinan itu kak. Bimbingan bidang nya kira-kira dua jam gitu kak, mulai bimbingan bidangnya setelah bimbingan bidang etika sosial. Yang ngajar Bapak Budi Prayitno.” (Santi Melinda, 9th, Jurusan Tata Rias 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

memiliki nilai standar rasio sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak dalam Balai yang lebih rendah dibandingkan dengan Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008. Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersifat bimbingan bidang yaitu bimbingan bidang sosial yang ditugaskan kepada pekerja sosial dengan rasio antara pekerja sosial dengan klien adalah 1:10. Standar rasio seharusnya sama atau mendekati pada setiap bimbingan bidang, hal ini bertujuan agar proses bimbingan bidang tepat sasaran dilakukan terhadap anak-anak.

Bimbingan bidang keterampilan merupakan aktifitas yang mendukung dan melatih bakat serta minat anak-anak yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus terhadap beberapa bidang keterampilan.

Bimbingan bidang yang diberikan sudah optimal dilakukan akan tetapi terkendala dengan kemampuan peserta pelatihan yang tidak dapat memahami semua program bimbingan bidang yang diajarkan sehingga lama untuk beradaptasi menerima program yang diberikan. Adapun bimbingan bidang keterampilan yang sudah ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yaitu :

Bimbingan bidang keterampilan menjahit dibutuhkan dalam salah satu bimbingan bidang di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus karena kebutuhan manusia akan pakaian merupakan hal yang sangat penting. Dalam proses menjadi suatu bentuk pakaian memerlukan beberapa tahap, mulai dari bahan mentah kemudian dilakukan pengolahan

menjadi bahan setengah jadi dan selanjutnya di proses menjadi suatu bentuk pakaian atau busana. Proses dari bahan kain menjadi sebuah pakaian atau busana yang siap dipakai ini disebut dengan menjahit. Pada proses menjahit ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, apabila seseorang ingin mahir dalam keterampilan menjahit, proses belajar menjahit tidak bisa dalam waktu yang singkat, perlu adanya bimbingan bidang dan arahan yang lebih tepat supaya menghasilkan karya yang baik dan rapi. Oleh sebab itu bimbingan bidang keterampilan menjahit ini disajikan dalam bentuk teori yang sejalan langsung dengan praktek dan berhubungan dengan pengenalan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan menjahit.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Kalau bimbingan bidang keterampilan menjahit dilakukan agar anak-anak setelah mempelajari materinya, mereka diharapkan dapat mengenal, mengetahui dan memahami komponen atau peralatan yang biasa digunakan dalam bidang menjahit serta dapat menerapkan atau menggunakan dalam praktek pada saat melakukan kegiatan menjahit.”

Bimbingan bidang keterampilan menjahit ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis pada pukul 08:00 hingga 12:00 WIB kemudian pada hari Rabu pada pukul 08:30 hingga 13:30 WIB dan pada hari Sabtu pada pukul 07:30 hingga 12:15 WIB, bimbingan bidang keterampilan dilakukan selama lima jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Ibu Samaryati. Proses pembelajaran bimbingan bidang keterampilan menjahit

ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan praktek. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, modul pelatihan dan alat menjahit sebagai alat peraga.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Samaryati, Instruktur Bimbingan bidang Keterampilan Jurusan Menjahit Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 16 Februari 2021 di labor keterampilan menjahit:

“Bimbingan bidang keterampilan menjahit ini dilakukan agar anak-anak dapat tahu dan mengerti mengenai sejarah dan pola dasar dari busana, proses dalam pembuatan pola busana, kemudian dapat menerapkan teknik-teknik dalam mengambil ukuran badan dan dapat melakukan praktek menjahit sehari-hari. Pemberian bimbingan bidang keterampilan menjahit dilakukan didalam labor menjahit dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya, selanjutnya langsung praktek. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu Kamis dan Sabtu. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Yulianabimbingan bidang menjahit setiap hari kak, kecuali hari jum’at dengan hari minggu. Setiap pagi praktek menjahit itu kak, yang ngajar ibu Samaryati.” (Yuliana, 15th Jurusan menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Iya kak, praktek menjahit itu setiap pagi kira-kira jam 8 sampai jam 12 siang. Bimbingan bidang menjahit di labor menjahit, diajar sama ibu Samaryati kak. Belajar materi dan peraktek nya di labor itu lah kak.” (Anis Mardiana, Jurusan Menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Menurut Deva menjahit ini memang sudah bakat Deva kak, setiap pagi Deva semangat ikut prakteknya. Yang bimbing ibu Samaryati, lumayan bagus lah ngajarnya kak.” (Deva Aryanti, 16th, Jurusan menjahit17

Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Bimbingan bidang keterampilan menjahit di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus juga memiliki permasalahan yang harus diselesaikan, masalah yang harus diselesaikan yaitu kurangnya perawatan yang dilakukan terhadap alat peraga menjahit. Mesin jahit yang digunakan memang sudah cukup lama, sehingga dibutuhkan perawatan secara berkala agar mesin jahit tersebut dapat berfungsi seperti yang seharusnya.

Selama praktek yang dilakukan oleh Ibu Samaryati terhadap anak-anak yang berminat untuk menjahit, permasalahan bahan kain tidak menjadi masalah utama untuk melakukan praktek, namun yang menjadi masalah ialah proses menjahit membutuhkan waktu yang lebih lama karena mesin jahit yang digunakan tidak lagi berfungsi secara optimal. Proses menjahit yang lebih lama ini mengakibatkan proses penyampaian seluruh materi menjahit kepada anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus menjadi lebih lama juga.

Permasalahan mesin jahit yang terjadi sangat merugikan bagi proses belajar mengajar pada bimbingan bidang keterampilan menjahit. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan anak yang dibina, berikut hasil wawancara dengan anakyang sedang dibina angkatan 72 :

“Selama praktek menjahit Anis selalu hadir kak, ada beberapa materi pakaian yang Anis suka. Tapi kadang-kadang juga mesin jahitaya itu macet kak, nggak mau menjahit. Tapi ya gimana lagi kak, nggak bisa lagi diperbaiki mesinnya.” (Anis Mardiana, 17th Jurusan menjahit 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Oh kalau mesin jahitnya memang agak rusak gitu kak, waktu yuli jahit pakaian ada jahitannya itu yang nggak rapi gara-gara mesin jahitannya macet. Ibu Samaryati sudah tahu masalah ini kak, tapi sampai sekarang masih tetap menunggu dulu mesinnya sampai selesai diperbaiki.” (Yuliana, 15th, Jurusan Menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Menurut Deva seharusnya memang diganti aja mesin jahitnya itu kak, susah menjahit kalau mesinnya rusak kak, memang sih menjahit juga butuh bakat dan minat, tapi kalau fasilitasnya kurang mendukung kan percuma aja kak.” (Deva Aryanti, 16th, Jurusan menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Hasil wawancara terhadap anak didik bimbingan bidang keterampilan menjahit diatas menunjukkan bahwa permasalahan mesin jahit yang tidak lagi bekerja secara optimal harus segera diselesaikan. Permasalahan ini dapat mengurangi kemampuan anak untuk menjahit apabila terus dibiarkan begitu saja dan dapat menurunkan kualitas bimbingan bidang yang ada pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Sebaiknya permasalahan perawatan mesin jahit ini dilakukan secara berkala dandilakukan perencanaan yang baik agar ditemukan rentang waktu yang tepat untuk membeli mesin jahit yang baru. Apabila perencanaan perawatan mesin jahit tidak dilakukan secara tepat, hal ini tentunya akan merugikan pada keterampilan menjahit anak dan merugikan bagi kualitas keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Keterampilan menjahit merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia, kebutuhan akan pakaian tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Selain hal tersebut, keterampilan menjahit juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang usaha apabila anak

didik telah menyelesaikan seluruh bimbingan bidangnya di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Sehingga berdasarkan hal tersebut, bimbingan bidang keterampilan menjahit pada bimbingan bidang keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dinilai cukup terimplementasi dalam mendidik keterampilan menjahit anak.

5. Sikap Para Pelaksana

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya

implementasi kebijakan.

a. Pemahaman Pelaksana Program

Pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103).

Wawancara pekerja sosial sebagai instruktur bimbingan bidang kepemimpinan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Bimbingan bidang kepemimpinan dilakukan didalam kelas dik, satu kelas itu ada tujuh puluh anak, sedangkan pak Budi hanya satu orang yang

mengajar didalam kelas itu. Coba bayangkan bagaimana rasanya mengajar dalam kelas dengan kondisi seperti itu. Pak Budi pun harus mencari cara bagaimana supaya semua anak dapat mengerti dengan apa yang Pak Budi sampaikan. Ada alat bantu pengeras suara, seperti pengeras suara itu sudah tua, jadi kadang-kadang tidak berfungsi. Selanjutnya juga ada infocus untuk menampilkan slide presentasi, tetapi pemasangannya agak lama, sehingga memakan waktu mengajar.”

Berdasarkan penjelasan diatas, Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru memiliki standar antara pekerja sosial dengan anak dalam bimbingan bidang sosial kepemimpinan tidak sesuai dengan standar rasio yang telah ditetapkan yaitu satu orang pembimbing dengan Tujuh puluh orang anak. Sehingga bimbingan bidang ini sebenarnya tidak layak dilaksanakan apabila standar rasio tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dibenarkan oleh anak yang mendapatkan bimbingan bidang kepemimpinan, hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau setiap bimbingan bidang memang begitu keadaannya kak, termasuk bimbingan bidang kepemimpinan. Setiap bimbingan bidang pasti keadaan kelasnya ribut kak, didalam kelas terlalu ramai dibandingkan dengan hanya satu orang guru didepan.” (Santi, 9th, Jurusan Tata Rias 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Yuli mengerti apa yang disampaikan Bapak Budi tentang kepemimpinan kak, tapi dikelas itu loh kak, terlalu ramai murid yang ikut bimbingan bidang itu, jadinya kadang tidak jelas apa yang disampaikan Bapak Budi. Kadang Bapak pakai pengeras suara supaya bisa dengar sampai belakang, tapi itupun hidup-mati pengeras suaranya.” (Yuliana, 15th Jurusan menjahit, 15 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Modul ada dikasi saat bimbingan bidang kepemimpinan itu kak, kadang Bambang cuma lihat-lihat modul saja dikelas. Anak-anak ada yang ribut kak, kadang Bapak juga marah dengan anak-anak yang ribut itu.” (M. Hardiansyah, 16th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Permasalahan kapasitas anak-anak yang terlalu banyak didalam kelas tidak mempengaruhi anak-anak untuk mengerti mengenai pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Budi Prayitno, S.ST. Bimbingan bidang ini rata-rata memang disukai oleh anak-anak, karena selain materi yang disampaikan juga penting untuk kepribadian anak, instruktur yang menyampaikan materi juga bisa mengkondisikan kelas agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh anak. Namun permasalahan ini seharusnya dapat dicarikan solusinya. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sudah membuat solusi agar proses pembinaan bimbingan bidang sosial dalam kelas dapat berjalan dengan optimal dengan salah satu menggunakan pengeras suara saat proses berlangsung, namun hal ini juga tidak menjadikan hasil yang lebih baik dalam perjalanannya, yang disebabkan alat itu sendiri dalam keadaan yang tidak layak untuk digunakan dan audio visual infocus yang dinilai oleh instruktur tidak dapat leluasa menggunakannya, dimana alat itu ketersediaanya masih langka. Selain itu suasana kelas yang tidak nyaman disebabkan panasnya udara karena kurangnya sarana pendingin ruangan yaitu kipas angin, yang dinilai oleh anak ketersediaanya tidak mencukupi.

b. Respon yang Jelas

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi

kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) (Edward 1980:147).

Materi yang disampaikan sepenuhnya dapat dimengerti oleh anak di BRSAMPK “Rumbai”. Berdasarkan uraian diatas rata-rata anak memahami dan dapat menerapkan dengan baik bimbingan bidang kepemimpinan yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Prayitno, S.ST dibandingkan dengan bimbingan bidang sosial yang lainnya. Dengan metode pengajaran Bapak Budi yang telah baik, anak didik dengan mudah dapat memahami dan melaksanakan seluruh materi yang telah di sampaikan oleh Bapak Budi. Bimbingan bidang kepemimpinan ini dapat memberi anak pengetahuan yang lebih luas mengenai cara menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri maupun untuk memimpin komunitas dan masyarakat. Kemudian dengan bimbingan bidang tersebut, anak juga dapat mengetahui cara mengambil kebijakan serta keputusan yang baik, sehingga dengan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkannya dapat memberikan manfaat untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Namun selama proses bimbingan bidang kepemimpinan berlangsung, terdapat beberapa permasalahan dalam hal fasilitas pendukung didalam kelas. Fasilitas pendukung untuk proses belajar mengajar seperti infocus, pengeras suara dan pendingin ruangan jumlah dan fungsi nya belum optimal digunakan selama proses bimbingan bidang. Tetapi dengan metode pembelajaran yang baik yang telah diterapkan, bimbingan bidang kepemimpinan pada bimbingan bidang sosial dinilai cukup terimplementasi dalam proses

pembelajaran anak didik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan sehat kita bisa melakukan dan berbuat hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang banyak. Maka kita patut bersyukur bila diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini bentuksyukur yaitu dengan cara menjaga anugerah yang diberikan tersebut. Dalam menjaga kesehatan ini dengan memperhatikan kesehatan diri, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Dalam bimbingan bidang etika sosial ini dijabarkan bagaimana menjagakesehatan diri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang kesehatan remaja mengajarkan anak bagaimana menjaga kesehatan dirinya dan kebersihan lingkungannya, agar mereka juga mengetahui perkembangan fisik maupun seksualnya pada usia remaja, sehingga mereka dapat mengerti tugas mereka sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian anak-anak juga dapat memahami dan menyadari pentingnya kebugaran jasmani bagi manusia serta aktif secara mandiri maupun kelompok dalam aktifitasnya menjaga dan membentuk kebugaran jasmani.”

Proses pembelajaran bimbingan bidang kesehatan remaja ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, diskusi, tanya jawab dan evaluasi. Bimbingan bidang kesehatan remaja ini dilaksanakan pada hari Rabu selama dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Pegawai Puskesmas Rumbai. Adapun

media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, pengeras suara dan alat bantu visual seperti infokus.

Bimbingan bidang keterampilan tata rias diadakan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus karena hal kecantikan merupakan dambaan semua orang, baik itu kecantikan jasmani maupun rohani. Kecantikan terkadang identik dengan kaumperempuan, hal ini tidak bisa dipinggiri dikarenakan mereka memerlukan hal tersebut. Mulai dari membersihkan wajah hingga meriasnya. Dalam ilmu tata rias banyak juga membahas tentang perawatan diri. Bimbingan bidang keterampilan jurusan tata rias ini menyajikan teori maupun praktek, yang membahas tentang pengenalan mengenai kulit, wajah, rambut permasalahannya, perawatan dan penataan serta beberapa tipe di dalam penggunaan kosmetik.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Nah kalau bimbingan bidang keterampilan tata rias ini bertujuan agar anak-anak dapat mengenai, mengetahui dan memahami mengenai dunia tata rias, baik dari rambut, wajah, maupun penampilan secara menyeluruh, serta etika dalam pelayanan pelanggan.”

Bimbingan bidang keterampilan tata rias ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis pada pukul 08:00 hingga 12:00 WIB kemudian pada hari Rabu pada pukul 08:30 hingga 13:30 WIB dan pada hari Sabtu pada pukul 07:30 hingga 12:15 WIB, bimbingan bidang keterampilan dilakukan selama lima jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan

oleh Ibu Asminar. Proses pembelajaran bimbingan bidang keterampilan tata rias ini dilakukan dengan metode pemberian teori, tanya jawab dan praktek. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, modul pelatihan dan alat tata rias sebagai alat peraga.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Asminar, Instruktur Bimbingan bidang Keterampilan Jurusan Tata Rias Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 16 Februari 2021 di Labor Keterampilan Tata Rias :

“Iya ibu instruktur untuk keterampilan tata rias, bimbingan bidang keterampilan tata rias ini dilakukan agar anak-anak dapat tahu dan mengerti mengenai pencucian dan pengguntingan rambut, pengecatan rambut, dan tata rias wajah. Pemberian bimbingan bidang keterampilan tata rias dilakukan didalam labor praktek tata rias dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya, selanjutnya langsung praktek. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Betul kak, memang dari awal Santi ingin nya di jurusan tata rias dan rata-rata teman Santi semua memang ingin mereka di jurusan ini. Bimbingan bidang tata rias memang setiap pagi kira-kira jam 8 sampai jam 12 siang. Bimbingan bidang tata rias di labor tempat Santi nyalon yang diajar sama ibu Asminar kak.” (Santi Melinda, 9th, Jurusan Tata Rias, 17 Februari, 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Azra praktek tata rias setiap hari kecuali hari jum’at dengan hari minggu. Setiap pagi praktek tata rias itu kak, yang jadi pembimbing ibu Asminar. Memang dari pagi sampai siang bimbingan bidangnya kak. Azra minat nya di jurusan tata rias ini kok kak, tidak ada -paksaan.” (Azra Ramadayani, 18th, Jurusan Tata Rias 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Dari semua jurusan yang disediakan Ratna tertarik sama jurusan tata rias saja kak dan dan setahu Ratna teman-teman sejurusan semua memang mau mereka ngambil jurusan tata rias di BRSAMPK ni kok kak. Yang jadi instruktur bimbingan bidang tata rias Ratna memang ibu Asminar. Menurut Ratna tata rias itu sangat nur butuhkan untuk penampilan kak, makanya Ratna ikut keterampilan tata rias ni.” (Ratna Sari, 16th Jurusan tata rias, 17FebruariFebruari2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Jika bimbingan bidang keterampilan menjahit yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya memiliki masalah terhadap mesin menjahit, namun pada bimbingan bidang keterampilan tata rias ini mempunyai masalah terhadap ketersediaan listrik dan air yang tidak dapat memenuhi kebutuhan xmtuk kegiatan tata rias di labor. Penyediaan listrik dan air harus memadai agar seluruh materi tata rias dapat di laksanakan dengan optimal, namun dengan keadaan yang sekarang terjadi pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tidak akan optimal seluruh proses belajar mengajar apabila listrik dan air yang dibutuhkan tidak memadai. Hal ini mengurangi waktu pengerjaan tata rias apabila alat tata rias yang digunakan tidak berfungsi dengan baik saat dibutuhkan.

Permasalahan listrik maupun air yang kurang dan tidak berfungsinya alat keterampilan saat dibutuhkan sangat merugikan bagi proses belajar mengajar pada bimbingan bidang keterampilan tata rias. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan anak yang dibina, berikut hasil wawancara dengan anak yang sedang dibina angkatan 72:

“Kalau menurut Ratna memang agak sulit praktek tata rias itu kalau sewaktu praktek yang membutuhkan air, airnya tak dapat keluar karena listrik yang mati-mati, kesal jadinya kak. Itulah Listrik dan Air sering jadi kendala waktu kegiatan kak.” (Ratna Sari, 16th Jurusan tata rias, 17

Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Santi tertarik banget dengan tata rias ini kak, pengennya nanti bisa keria disalon, atau punya salon sendiri, tapi dengan bimbingan bidang yang kadang listrik mati-mati, jadi alat nyalon kan tidak bisa dipake kak. Sedang nyalon, eh listrik mati, jadinya tidak selesai-selesai prakteknya karena sibuk dengan listrik. Akhirnya kan tertunda-tunda prakteknya kak.”(Santi Melinda, 9th Jurusan Tata Rias, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Tbu Asminar sudah baik banget ngajar tata riasnya kak, tapi kurangnya memang di Listrik yang tidak cukup mungkin ya kak daya nya untuk kami hidupkan semua alat-alat salon sewaktu praktek nyalon. Azra suka banget sama jurusan ini, memang mau Azra di jurusan ini kak.” (Azra Ramadayani 18th, Jurusan Tata Rias 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Wawancara terhadap anak didik bimbingan bidang keterampilan tata rias diatas menunjukkan bahwa masalah serius yang harus dihadapi oleh pembina Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ialah masalah pengadaan listrik dan air yang tidak memadai dan perbaikan serta perawatan secara berkala untuk alat tata rias yang digunakan oleh anak-anak. Hal ini perlu diperhatikan agar kualitas Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dapat meningkat dan memiliki kemampuan yang baik. Permasalahan listrik dan air serta perawatan alat tata rias tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan perencanaan yang baik terhadap seluruh fasilitas yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Sehingga dengan perencanaan yang baik tersebut dapat melancarkan seluruh bimbingan bidang keterampilan tata rias yang diberikan kepada anak didik. Bimbingan bidang ini merupakan kebutuhan yang mendasar

khususnya bagi pribadi wanita, seharusnya bimbingan bidang keterampilan tata rias ini dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada anak didik khususnya wanita. Keterampilan tata rias ini juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang baik, karena tata rias tidak hanya mempelajari mengenai wajah saja, namun juga mempelajari mengenai rambut dan perawatannya. Sehingga bimbingan bidang keterampilan tata rias ini dinilai cukup terimplementasi dalam proses bimbingan bidang keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan dalam proses meningkatkan keahlian serta kemampuan anak di bidang tata rias.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

a. Penentuan Kelurahan Sasaran

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan

umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra,S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Karena bimbingan bidang kesehatan remaja ini menyangkut dengan kesehatan, sehingga kami bekerja sama dengan pihak Puskesmas Rumbai. Dengankerja sama ini, kami menyerahkan sepenuhnya bimbingan bidang mengenai kesehatan remaja kepada pihak Puskesmas Rumbai tersebut. Kemudian, dengan pemberian bimbingan bidang dari Puskesmas Rumbai tersebut diharapkan materi yang disampaikan lebih tepat dan anak dapat memahami pentingnya arti kesehatan. Pemberian materi juga dilakukan didalam kelas dengan menyajikan materi dalam bentuk tampilan slide, sejalan dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari Rabu jam 13:30-15:00 WIB dalam waktu enam bulan. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Bimbingan bidang kesehatan remaja memang dari puskesmas kak, bimbingan bidang di kelas Elvis jam 1 gitu kak. Kadang yang mengajar materinya ibu-ibu, kadang kakak-kakak juga yang menerangkan kak.” (Elvis, 17th Jurusan Las,16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Anis selalu ikut bimbingan bidang kesehatan itu kak, bimbingan bidang nya dimulai setelah istirahat dan makan siang kak, kira-kira jam setengah 2 gitu kak.” (Anis Mardiana, 17th Jurusan menjahit 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Iya kak, kalau bimbingan bidang kesehatan remaja yang kasih materi itu dari Puskesmas Rumbai kalau nggak salah Nopal kak. Kalau Bimbingan bidangnya dimulai dari jam 13:30 siang kak, sampai jam 3 gitu kak.” (Nopal Pianda Saputra, 17th Jurusan Las, 15 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Dalam bidang bimbingan bidang kesehatan bagi remaja, Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus memiliki nilai standar rasio sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak dalam Balai yang lebih rendah dibandingkan dengan Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008. Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersifat bimbingan bidang yaitu bimbingan bidang sosial yang ditugaskan kepada pekerja sosial dengan rasio antara pekerja sosial dengan klien adalah 1:10. Standar rasio yang telah ditetapkan tersebut seharusnya diikuti oleh setiap bimbingan bidang yang dilakukan, khususnya bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini.

Wawancara kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Selama ini bimbingan bidang kesehatan remaja dilakukan didalam kelas, Bapak mendapat informasi dari anak-anak kalau kadang pihak Puskesmas tidak menghadiri kelas bimbingan bidang itu. Kami dari pihak Balai tidak bisa menegur mereka, karena kami juga sangat membutuhkan mereka untuk mengajar tentang kesehatan itu untuk anak-anak. Bimbingan bidang ini dilakukan setiap hari Rabu jam 13:30 hingga 15:00 WIB. Permasalahan bimbingan bidang ini sama halnya dengan bimbingan bidang lain yang terdapat di BRSAMPK ini, yaitu masalah jumlah murid yang terlalu banyak.”

Hasil wawancara dari Bapak Yusti diatas, Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru memiliki standar antara instruktur dengan

anak dalam bimbingan bidang kesehatan remaja tidak sesuai dengan standar rasio yang telah ditetapkan yaitu satu orang instruktur dengan tujuh puluh orang anak. Seharusnya bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini dilakukan untuk jumlah anak-anak yang sesuai dengan kemampuan instruktur dari Puskesmas Rumbai tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh anak yang mendapatkan bimbingan bidang kesehatan bagi remaja, hasil wawancara sebagai berikut:

“Sama saja dengan bimbingan bidang yang lain kak, bimbingan bidang kesehatan remaja ini juga banyak muridnya, jadinya kadang orang dari puskesmas marah-marah juga. Terlalu ribut dalam kelas. Yanto kadang juga ikut ribut kak.” (Mahendra Yanto , 17th, Jurusan Las 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Danu hadir terus kalau bimbingan bidang kesehatan itu kak, tapi kadang juga orang dari puskesmasnya yang ngajar nggak datang kak. Mungkin karena mereka juga bosan dengan kami kak, soalnya ada yang ribut waktu bimbingan bidang kak.” (Danu Irawan, 14th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Belajar kesehatan itu sebenarnya penting untuk Nursiah kak, apalagi ada belajar cara hidup sehat juga kan. Yang bikin nggak enak itu terlalu ribut didalam kelas kak, walaupun kadang dari puskesmas itu ada 2 orang, tapi tetap aja mereka nggak bisa ngatur anak-anak yang ribut, jadinya nggak dengar apa yang disampaikan.” (Santi, 9th Jurusan tata rias, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Permasalahan kapasitas anak-anak yang terlalu banyak didalam kelas memang mempengaruhi anak-anak untuk mengerti mengenai pelajaran kesehatan yang disampaikan oleh pihak Puskesmas Rumbai. Bimbingan bidang ini seharusnya tidak bisa dilaksanakan dengan jumlah anak-anak yang terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah instruktur yang sedikit, penyampaian materi tidak

akan optimal.

Namun permasalahan ini seharusnya dapat dicarikan solusinya. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sudah membuat solusi agar proses pelayanan dalam membina program bimbingan bidang sosial dalam kelas dapat berjalan dengan optimal dengan salah satu menggunakan pengeras suara saat proses berlangsung, namun hal ini juga tidak menjadikan hasil yang lebih baik dalam perjalanannya, yang disebabkan alat itu sendiri dalam keadaan yang tidak layak untuk digunakan dan visual infocus yang dinilai oleh instruktur tidak dapat leluasa menggunakannya.

Metode pengajaran yang disampaikan oleh pihak Puskesmas Rumbai sudah baik untuk bimbingan bidang sosial kesehatan ini, namun terdapat juga masalah seperti ketidakhadiran instruktur.

Bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini dinilai sudah baik dilaksanakan di BRSAMPK "Rumbai", hal tersebut diketahui dari penjelasan anak-anak diatas. Namun untuk permasalahan yang harus diselesaikan ialah mengatur waktu yang tepat dengan pihak Puskesmas Rumbai untuk melaksanakan bimbingan bidang kesehatan bagi remaja. Dengan pengaturan waktu yang tepat terhadap pihak puskesmas yang memberikan bimbingan bidang kesehatan bagi remaja tersebut, diharapkan bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini dapat berjalan dengan lancar, serta materi yang disampaikan sepenuhnya dapat di mengerti oleh anak didik. Selain ketidakhadiran instruktur pembimbing tersebut, masalah yang terjadi lainnya yaitu kurangnya fasilitas pendukung untuk melaksanakan bimbingan bidang di kelas, hal ini seharusnya dapat di optimalkan

dengan perencanaan fasilitas yang baik dari pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Materi yang disampaikan pada bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini sangat penting diketahui oleh anak didik agar memahami proses perubahan fisik yang dialami sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut, kemudian dapat memahami cara menjaga kesehatan jasmani, akibat dari kurangnya menjaga kesehatan jasmani, dan mencegah terjadinya cedera atau kecelakaan disaat beraktifitas. Bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap cara mensyukuri kesehatan jasmani yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dari hal tersebut, bimbingan bidang kesehatan bagi remaja ini dinilai cukup terimplementasi dalam proses bimbingan bidang sosial anak didik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

b. Respon Kelurahan Sasaran

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn

dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing - masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinamika kelompok merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Dimana setiap manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, yang mana mereka tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain baik itu untuk bertukar pikiran, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bersosialisasi maupun kelangsungan hidup mereka.

Dinamika kelompok sangat penting untuk dipelajari agar kita dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan kelompok. Selain itu kita juga dapat mengetahui manfaat-manfaat dari hidup berkelompok dan bagaimana hidup berkelompok itu.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra,S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Untuk bimbingan bidang dinamika kelompok itu dilaksanakan agar anak-anak dapat mengetahui pengertian dari kelompok, masalah-masalah yang ada dalam kelompok dan mengerti akan manfaat kelompok. Kemudian diharapkan anak-anak juga dapat menerapkan membentuk suatu kelompok dengan baik.”

Bimbingan bidang dinamika kelompok ini dilaksanakan pada hari Kamis selama dua jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Bapak L. Tukmasari Hrp, S.ST. Proses pembelajaran bimbingan bidang dinamika kelompok ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan materi, kemudian penyajian materi, diskusi, tanya jawab dan evaluasi. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, pengeras suara dan alat bantu visual seperti infocus.

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Bimbingan bidang dinamika kelompok itu dilakukan setiap hari Kamis jam 1 gitu kak. Yang ngajar Bapak Tukmasari, Deva juga datang terus bimbingan bidang itu kak.” (Deva Aryanti, 16th Jurusan menjahit, 18 Desember 2012 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Yuli juga ikut bimbingan bidang dinamika kelompok itu kak, itu penting untuk kerja kelompok. Bimbingan bidangnya setiap hari Kamis jam setengah dua kak. Yang kasih materi Bapak Tukmasari.” (Yuliana, 15th Jurusan menjahit 15 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Kalau bimbingan bidang dinamika kelompok itu Bapak Tukmasari yang ngajar kak, bagi Santi Bapak itu kurang menarik mengajarnya. Bimbingan bidangnya setiap hari Kamis setelah jam istirahat dan makanan siang kak.” (Santi Melinda, 9th Jurusan Tata Rias, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Kadang-kadang Bapak Tukmasari itu nggak datang kak, kalau Yanto tidak salah bimbingan bidangnya diadakan setiap Kamis jam 13:30 siang kak, sampai jam 15:00 sore gitu.” (Mahedra Yanto, 17th, Jurusan Las 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus memiliki nilai standar rasio sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan

sosial kepada anak dalam Balai yang lebih rendah dibandingkan dengan Pelayanan Sosial BRSAMPK, Depos RI 2008 dalam bidang bimbingan bidang dinamika kelompok. Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersifat bimbingan bidang yaitu bimbingan bidang sosial yang ditugaskan kepada pekerja sosial dengan rasio antara pekerja sosial dengan klien adalah 1:10. Standar rasio 1:10 yang telah ditetapkan tersebut seharusnya diikuti agar tujuan pembelajaran pada BRSAMPK “Rumbai” dapat berjalan dengan baik dan benar.

Wawancara pekerja sosial sebagai instruktur bimbingan bidang dinamika kelompok kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021_08:30 WIB di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bimbingan bidang dinamika kelompok yang selama ini dilakukan dengan instruktur Bapak L. Tukmasari Hrp, S.ST, bimbingan bidang itu dilaksanakan didalam kelas. Kadang Bapak Tukmasari juga mengeluh kepada saya mengenai terlalu ributnya anak-anak didalam kelas, sehingga proses belajar mengajar juga tidak efektif dilaksanakan. Bimbingan bidang bimbingan bidang kelompok dilakukan setiap hari Kamis jam 13:30 hingga 15:00 WIB. Permasalahan bimbingan bidang ini sama halnya dengan bimbingan bidang lain yang terdapat di BRSAMPK ini, yaitu masalah jumlah murid yang terlalu banyak.”

Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru memiliki standar antara instruktur dengan anak dalam bidang bimbingan bidang dinamika kelompok tidak sesuai dengan standar rasio yang telah ditetapkan yaitu satu orang instruktur dengan seratus orang anak. Seharusnya bimbingan bidang dinamika kelompok ini dilakukan untuk jumlah anak-anak yang sesuai dengan kemampuan instruktur, dengan keadaan yang saat ini terjadi pada BRSAMPK “Rumbai”

proses belajar mengajar bimbingan bidang dinamika kelompok hanya bermanfaat bagi sedikit anak yang mendengar penjelasan dari instruktur.

Hal tersebut dibenarkan oleh anak yang mendapatkan bimbingan bidang dinamika kelompok, hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau bimbingan bidang dinamika kelompok itu sama aja dengan bimbingan bidang yang lainnya kak. Dalam kelas itu anak-anak terlalu ribut kak, jadinya Yanto tidak bisa konsentrasi belajarnya.” (Mahendra Yanto, 17th, Jurusan Las, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Kadang bimbingan bidang dinamika kelompok ini tidak ada kak, karena Bapak Tukmasari kadang tidak datang kak. Mungkin karena didalam kelas Edi ribut juga kak, makanya Bapak tidak datang.” (Edi Purwanto, 18th Jurusan otomotif 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Belajar dinamika kelompok penting untuk Hardi kak, apalagi Hardi tahu kalau berkelompok tugas atau belajarnya jadi ringan. Tapi kurangnya didalam kelas itu ribut kak, suara Bapak Tukmasari nggak bisa ngelawan suara anak-anak yang ribut kak.” (M.Hardiansyah, 16th, Jurusan otomotif 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Belajar dinamika kelompok itu nggak ngerti kak, Ikhsan cuma tahu praktek berkelompok aja. Didalam kelas Ikhsan memang tidak memperhatikan, duduknya dibelakang aja.” (Ikhsan Purnomo Aji, 19th Jurusan Las, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Untuk setiap bimbingan bidang di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus memiliki permasalahan yang sama yaitu permasalahan banyaknya anak murid yang memenuhi kelas. Penuhnya kelas tersebut mengakibatkan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh instruktur tidak optimal. Namun permasalahan ini seharusnya dapat dicarikan solusinya. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sudah

membuat solusi agar proses pembinaan bimbingan bidang sosial dalam kelas dapat berjalan dengan optimal dengan salah satu menggunakan pengeras suara saat proses berlangsung, namun hal ini juga tidak menjadikan hasil yang lebih baik dalam perjalanannya, yang disebabkan alat itu sendiri dalam keadaan yang tidak layak untuk digunakan dan visual infocus yang dinilai oleh instruktur tidak dapat leluasa menggunakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan, diperoleh beberapa permasalahan yaitu pada seluruh bimbingan bidang sosial terdapat masalah pada fasilitas pendukung proses belajar mengajar didalam kelas, fasilitas pendukung tersebut seperti tidak optimalnya fungsi infocus, pengeras suara dan pendingin ruangan. Kemudian pada bimbingan bidang sosial kewirausahaan, kewarganegaraan, dan dinamika kelompok terdapat permasalahan terhadap tidak optimalnya instruktur mengajar. Untuk mencapai tujuan bimbingan bidang sosial yang baik tentunya pihak BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru juga harus memperhatikan kualitas instruktur serta menetapkan standar proses pembelajaran yang baik, agar anak didik yang dilakukan bimbingan bidang dapat memahami dan mengerti secara menyeluruh materi yang disampaikan. Selanjutnya juga terdapat permasalahan tata tertib anak didik yang tidak baik pada bimbingan bidang konseling, permasalahan ini juga seharusnya diperhatikan dari faktor instruktur yang tidak optimal mengajar.

Permasalahan yang terakhir pada bimbingan bidang sosial yaitu terdapat pada bimbingan bidang kesehatan bagi remaja, permasalahan yang terdapat pada bimbingan bidang ini yaitu tidak adanya pengaturan dan kesepakatan jadwal yang

tepat dari pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus terhadap pihak puskesmas yang melakukan bimbingan bidang kesehatan bagi remaja, karena hal tersebut bimbingan bidang kesehatan bagi remaja sering tidak dilaksanakan karena instruktur dari puskesmas tidak menghadiri bimbingan bidang kesehatan bagi remaja. Kemudian permasalahan yang terjadi pada bimbingan bidang keterampilan yaitu permasalahan tidak optimal nya fungsi alat pada bimbingan bidang keterampilan menjahit, tata rias, dan otomotif. Permasalahan alat ini disebabkan karena kurangnya perawatan alat dan penggunaan alat yang tidak tepat. Selanjutnya permasalahan fasilitas juga terdapat pada bimbingan bidang keterampilan tata rias yaitu kurangnya listrik dan air pada saat bimbingan bidang. Dan terkahir masalah yang terjadi pada bimbingan bidang keterampilan ini yaitu tidak tertibnya anak didik selama proses bimbingan bidang keterampilan teknik las berlangsung.

Permasalahan yang telah diuraikan diatas baik yang terjadi pada bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, seharusnya dapat diselesaikan dengan perencanaan yang baik dalam hal seluruh fasilitas yang terdapat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, kemudian dalam hal kualitas serta kemampuan instruktur pembimbing, dan selanjutnya dalam hal metode bimbingan bidang anak didik yang baik. Dengan beberapa solusi tersebut diharapkan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dapat mencapai tujuan yang diinginkan untuk meningkatkan kulaitas anak didik dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus sendiri.

Dilaksanakannya bimbingan bidang keterampilan otomotif pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus karena diperlnkannya kemampuan untuk mengenal komponen atau peralatan yang biasanya digunakan dalam dunia otomotif. Selain itu diperkenalkan juga teknik untuk mengetahui kemungkinan kerusakan pada kendaraan roda 2 (dua) serta alternatif-alternatif cara untuk memperbaikinya. Sehingga dengan adanya bimbingan bidang keterampilan otomotif ini dapat meningkatkan kemampuan serta bakat anak untuk mengerti dan memahami dunia otomotif, khususnya mengenai kendaraan roda dua (2).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra,S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Kalau bimbingan bidang keterampilan otomotif itu agar anak dapat mengenal, mengetahui dan memahami komponen atau peralatan yang biasa digunakan dalam dunia otomotif, serta dapat menerapkan atau menggunakannya dalam praktek pada saat memperbaiki peralatan otomotif yang mengalami kerusakan.”

Bimbingan bidang keterampilan otomotif ini juga dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis pada pukul 08:00 hingga 12:00 WIB kemudian pada hari Rabu pada pukul 08:30 hingga 13:30 WIB dan pada hari Sabtu pada pukul 07:30 hingga 12:15 WIB, bimbingan bidang keterampilan dilakukan selama lima jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan

oleh Bapak Anwar R. sebagai instruktur labor 1 dan 2. Adanya dua kelas otomotif ini dikarenakan banyaknya jumlah anak yang mengikuti bimbingan bidang keterampilan otomotif, sehingga diperlukan dua kelas untuk memenuhi kebutuhan bimbingan bidang tersebut. Proses pembelajaran bimbingan bidang keterampilan otomotif ini dilakukan dengan metode pemberian ceramah, tanya jawab dan praktek. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, modul pelatihan dan alat otomotif seperti kendaraan roda dua sebagai alat peraga.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anwar R., Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 16 Februari 2021 di Labor Otomotif Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Bapak memang instruktur di kelas bimbingan bidang otomotif ,Bapak dikelas otomotif 1 dan 2. Pemberian materi otomotif ini yaitu pengenalan peralatan dalam perbengkelan sepeda motor, suku cadang mesin sepeda motor, komponen mesin, dan bongkar pasang mesin sepeda motor, kemudian mengenai keselamatan kerja. Pemberian bimbingan bidang keterampilan otomotif dilakukan didalam labor praktek otomotif dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak bertanya, selanjutnya langsung praktek. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Bimbingan bidang keterampilan otomotif memang setiap hari kak, kalau hari jum’at dan minggu memang tidak ada kak. Kalau Edi dikelas yang ngajar Bapak Anwar.” (Edi Purwanto, 18th Jurusan otomotif ,16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Dikelas itu yang ngajar Bapak Anwar, Bimbingan bidangnya dari pagi sampai siang, lumayan lama jugalah Kak.” (Danu Irawan, 14th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Setiap pagi sampai kira-kira sebelum jam makan siang memang ada bimbingan bidang otomotif kak. Kalaupun kelas yang ngajar Bapak Anwar”. (Hardiansyah, 16th Jurusan, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Permasalahan yang terdapat pada bimbingan bidang keterampilan otomotif ini yaitu terjadi kekurangan alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk mengenal bagian-bagian yang terdapat pada sepeda motor dan untuk sepeda motor yang digunakan sebagai alat peraga merupakan sepeda motor dengan jenis mesin yang sudah lama. Permasalahan kekurangan alat dan perlengkapan sepeda motor tersebut menyebabkan proses pengenalan sepeda motor tidak sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal, akibatnya ada bagian-bagian yang tidak diketahui oleh anak-anak. Sedangkan masalah sepeda motor yang sudah lama digunakan sebagai alat peraga menyebabkan anak tidak mengetahui perkembangan sepeda motor yang ada pada saat ini, baik dalam bidang mesin, peralatan, maupun teknologinya. Sehingga apabila anak bekerja sebagai mekanik sepeda motor, mereka akan mengalami kesulitan dalam hal memahami jenis sepeda motor yang mempunyai teknologi baru seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai permasalahan yang terjadi pada bimbingan bidang keterampilan otomotif tentunya akan mengakibatkan kurangnya kemampuan anak. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan anak yang dibina, berikut hasil wawancara dengan anak yang sedang dibina angkatan 72 :

“Menurut Edi nggak terlalu susah untuk jadi mekanik motor kak, yang

penting itu niat kak. Tapi alat-alat dilabor masih ada yang kurang, jadinya memang sulit belajar kalau gitu keadaannya yah Kalau dikategorikan seperti level hotel Standarlah kak layaknya hotel bintang 3.” (Edi Purwanto, 18th Jurusan otomotif, 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Danu memang tertarik belajar otomotif kak, apalagi belajarnya tentang sepeda motor. Tapi kurangnya motor yang dipakai itu udah tua umurnya kak. Motor sekarang udah canggi-canggih, mana ada yang sama dengan motor yang ada di labor otomotif.” (Danu Irawan, 14th Jurusan otomotif 16 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Masalah yang diperoleh berdasarkan wawancara anak didik bimbingan bidang keterampilan otomotif diatas menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembina di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yaitu permasalahan pengadaan peralatan dan perlengkapan sepeda motor agar lebih lengkap dan masalah pembaharuan sepeda motor yang digunakan didalam labor otomotif agar anak dapat mengikuti perkembangan teknologi sepeda motor yang terkini.

Bimbingan bidang keterampilan otomotif ini merupakan salah satu bidang usaha yang dapat ditekuni oleh anak didik agar dapat menciptakan usaha otomotif apabila telah menyelesaikan seluruh bimbingan bidangnya di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Bimbingan bidang keterampilan otomotif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap seluruh komponen pada kendaraan roda dua. Selain hal itu, anak didik juga dapat mengetahui cara yang baik untuk melakukan perbaikan maupun perawatan secara berkala terhadap komponen sepeda motor yang mengalami kerusakan. Berdasarkan manfaat tersebut, bimbingan bidang keterampilan otomotif yang

merupakan bagian dari bimbingan bidang keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dinilai cukup terimplementasi dalam mendidik kemampuan anak dibidang otomotif.

Bimbingan bidang keterampilan teknik las membahas mengenai identifikasi, penggunaan dan pemeliharaan peralatan kerja mekanik las listrik maupun las otonom atau gas karbit, memahami prinsip kerja las listrik, otonom dan las karbit, memelihara mesin-mesin peralatan las listrik maupun otonom dan tangki karbit, mengetahui dan memahami simbol-simbol las, mengukur, merancang gambar dan perencanaan suatu bentuk motif atau pola, serta membuat mendesain dan membentuk suatu produksi barang.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yustisia Dwi Putra, S.ST, Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15 Februari 2021 di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

“Pada bimbingan bidang keterampilan teknik las akan membahas tentang pengenalan komponen peralatan yang biasanya digunakan dalam dunia pengelasan. Selain itu diperkenalkan juga teknik dalam melakukan pengelasan agar hasilnya rapi, bagus dan kokoh atau kuat.”

Bimbingan bidang keterampilan teknik las ini juga dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis pada pukul 08:00 hingga 12:00 WIB kemudian pada hari Rabu pada pukul 08:30 hingga 13:30 WIB dan pada hari Sabtu pada pukul 07:30 hingga 12:15 WIB, bimbingan bidang keterampilan dilakukan selama lima jam bimbingan bidang @45 menit setiap minggu selama enam bulan yang diberikan oleh Bapak H. Mislan. Proses pembelajaran bimbingan bidang keterampilan teknik las ini dilakukan dengan metode pemberian ceramah, tanya jawab dan

praktek. Adapun media yang digunakan dalam proses pengajaran seperti alat tulis, modul pelatihan dan alat las seperti las listrik dan las karbit sebagai alat peraga.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Mislan, Fungsional Pekerja Sosial Bimbingan bidang Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 17 Februari 2021 di Labor Las Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

“Saya memang ngajar di keterampilan teknik las. Bapak mengajar mengenai bahasan pengenalan las listrik dan las karbit, pengenalan peralatan yang digunakan, cara mengelas yang baik, macam-macam jenis las yang digunakan, kemudian praktek mengelas karbit, selanjutnya praktek las listrik. Pemberian bimbingan bidang keterampilan teknik las dilakukan didalam labor praktek las dengan ceramah sebagai penjelasan dan juga memberi kesempatan untuk anak’bertanya, selanjutnya langsung praktek. Kegiatan bimbingan bidang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Proses pengajaran berdasarkan silabus bimbingan bidang sosial dan keterampilan yang disediakan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.”

Berikut wawancara kepada siswa/i yang masih dalam pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus angkatan 72 :

“Nopal tertarik belajar las karena memang bagus untuk kerjaan kak. Setiap pagi itu bimbingan bidangnya kak, yang ngajar Bapak Mislan kak. Memang sudah menjaik keinginan Nopal dari awal mendaftar di BRSAMPK ini mau ambil jurusan las kak.” (Nopal Pianda Saputra, 17th, Jurusan Las, 15 Februari, 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Iya kak, Elvis sendiri yang ingin di jurusan las ini kok kak. Bapak Mislan memang ngajar teknik las kak, setiap pagi sampai siang. Kalau dari pagi itu ceramah aja kak, agak siang baru lasnya dimulai. Kalau Elvis lumayan semangat juga lah belajarnya kak.” (Elvis Ramadhan, 17th, Jurusan las, 15 Februari, 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Permasalahan yang terdapat pada bimbingan bidang keterampilan teknik las ialah pada bimbingan bidang anak-anak yang kurang memiliki tata tertib saat

belajar mengajar berlangsung. Sulitnya pengendalian anak yang tidak tertib itu menyebabkan konsentrasi baik instruktur maupun anak yang ingin serius belajar menjadi terganggu.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai permasalahan yang terjadi pada bimbingan bidang keterampilan teknik las tentunya akan mengakibatkan kurangnya kemampuan anak. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan anak yang dibina, berikut hasil wawancara dengan anak yang sedang dibina angkatan 72 :

“Saya memang serius ikut teknik las ini kak, tapi kadang memang terganggu dengan anak-anak yang tidak serius kalau dalam kegiatan, karena mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri. Padahal Bapak Mislan sudah benar-benar serius mengajar kami semua kak.” (Mahendra Yanto, 17th, Jurusan Las 15 Februari, 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

Masalah-masalah yang telah diperoleh dari hasil wawancara tersebut sebaiknya segera diselesaikan oleh pembina di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus agar dapat menciptakan suasana yang tertib didalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Permasalahan tidak tertibnya anak didik saat proses bimbingan bidang berlangsung seharusnya dapat diselesaikan dengan metode penyampaian materi oleh instruktur yang baik, sehingga anak didik tertarik untuk dapat mempelajari keterampilan las ini. Bimbingan bidang keterampilan las ini merupakan salah satu keterampilan yang juga dibutuhkan pada beberapa industri, keahlian dan kemampuan las yang baik tentunya akan mempermudah anak didik untuk bekerja pada sebuah industri. Sehingga berdasarkan manfaat keahlian las tersebut, bimbingan bidang keterampilan teknik las ini dinilai cukup terimplementasi dalam proses bimbingan bidang keterampilan kepada anak didik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus.

Berdasarkan Standar Pelayanan Sosial Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja Tahun 2008, Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja yang dilihat dari perspektif kelembagaan Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru harus mempunyai program sesuai dengan Misinya, dimana penetapan jadwal pelaksanaan program yang efektif agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan optimal. Terlihat pada kegiatan bimbingan bidang keterampilan, waktu pelayanan bimbingan bidang dalam Balai yang hanya enam bulan dinilai relatif singkat dimana anak tidak dapat memahami materi praktek dengan baik. Tampak setelah tamat dari Balai anak tidak menggunakan kemampuan keterampilannya untuk mengembangkan diri di kehidupan bermasyarakat. Sehingga pemberian pelayanan bimbingan bidang keterampilan Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja Rumbai tidak dapat diterima oleh seluruh anak dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan data persentase dari BRSAMPK yaitu : Bekerja pada orang lain/mandiri 30%, buka usaha sendiri/Wirusaha 7,5%, melanjutkan sekolah/Kuliah 15%, dirujuk ke Balai/Yayasan/Lembaga lain 0%, dan kembali ke Orang Tua 47,5%. Hasil penelitian lapangan yang berdasarkan keterangan anak-anak bahwa waktu yang disediakan enam bulan tidak menjadi permasalahan untuk mereka dapat memahami bahan ajaran dari pembina khususnya dalam bimbingan bidang keterampilan dan instruktur merasa cukup waktu enam bulan untuk mengajarkanteori maupun praktek keterampilan pada anak. Hal ini dapat dilihat hasilwawancara dengan anak-anak yang dibina angkatan 72 sebagai berikut:

“Saya rasa waktu enam bulan ini cukup lah kak untuk memahami keterampilan menjahit, untuk semua materi yang ada di modul dapat

dipraktekkan. Instruktur juga selesai mengajarkan semua materi yang ada di modul kak”. (Deva Aryanti, 16th Jurusan menjahit, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Cukuplah lah kak enam bulan ni, Nopal udah bisa untuk membongkar mesin, ngerasa sudah berani kok kak mau kerja ditempat orang setelah tamat ini, semua materi modul juga sudah dijelaskan dan semua ada prakteknya”. (Nopal Pianda Saputra, 17th Jurusan otomotif , 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Azra udah bisa semua kok kak materi tata rias, kalau sudah tamat Azra udah beranilah mau pakai keterampilan ini untuk bekerja, waktu belajar yang enam bulan ini cukuplah untuk bisa mengerti semua yang diajarkan sama instruktur”. (Azra Ramadayani, 18th, Jurusan tata rias, 17 Februari 2021 di Kantor Fungsional Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

“Waktu disediakan untuk mengajarkan keterampilan memang dalam waktu enam bulan ini, saya rasa sudah cukup waktu enam bulan ini untuk mengajarkan semua materi maupun praktek keterampilan ini kepada anak dan anak-anak juga sudah bisa untuk bekerja jika mereka ingin, karena hasil ujian akhir juga tampak, semua anak rata-rata sudah cukup mampu dan telah memiliki kemampuan keterampilannya, tinggal bagaimana kemauan anak saja lagi setelah tamat nanti”. (Ibu Samaryati, Instruktur Bimbingan bidang Keterampilan Jurusan Menjahit Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 17 Februari 2021 di labor keterampilan menjahit).

Kebijakan pengembangan Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja

Rumbai dibutuhkan untuk dapat merespon permasalahan sosial anak putus sekolah dalam memberikan pelayanan. Minimnya jenis kegiatan bimbingan bidang keterampilan Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja Rumbai yang hanya memiliki empat Jurusan bimbingan bidang yaitu Jurusan Otomotif, Las, Menjahit dan Tata Rias (salon).

Pentingnya bimbingan bidang sosial yang diberikan kepada anak didik yaitu untuk memberi pengetahuan, pemahaman, serta membuka pola pikir yang

lebih baik agar anak didik dapat mengerti pentingnya berwirausaha, mengerti berperilaku yang baik untuk diri sendiri, berkelompok, bermasyarakat dan bernegara, kemudian mengerti pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta dapat mengerti cara yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi baik pada diri anak didik sendiri maupun permasalahan yang terjadi pada orang lain disekitarnya. Selanjutnya manfaat yang dapat diperoleh anak didik dari bimbingan bidang keterampilan yaitu, anak didik dapat mengetahui potensi, minat dan bakatnya untuk mengembangkan dan menambah keahlian serta kemampuannya baik dalam bidang menjahit, tata rias, otomotif maupun dalam bidang teknik pengelasan. Apabila anak didik telah menyelesaikan bimbingan bidangnya di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, bimbingan bidang keterampilan ini juga memberikan kemampuan yang cukup untuk anak didik yang ingin mendirikan usaha sesuai dengan bidangnya dan memberikan kemudahan bagi anak didik untuk memasuki sebuah usaha atau industri karena mereka telah memiliki kemampuan dan keahlian baik dibidang menjahit, tata rias, otomotif, maupun dalam bidang teknik pengelasan. Berdasarkan manfaat yang dapat diberikan dari bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan tersebut, program bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan yang terdapat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dinilai cukup terimplementasi dalam menciptakan dan mengembangkan kemampuan serta keahlian anak didik.

5.2 Faktor Penghambat Dalam Membina Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam suatu proses atau kegiatan. Masalah-masalah yang terjadi dari suatu proses dijelaskan dalam bentuk yang lebih kompleks. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor manusia, faktor alat atau peralatan, faktor metode dan faktor lingkungan. Berikut penjelasan faktor penghambat yang terjadi dalam proses pembinaan remaja putus sekolah terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

1. Faktor Manusia

Manusia merupakan pelaku utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik jika manusia memiliki kemampuan yang cukup sesuai dengan apa yang dilakukannya. Terjadinya kesalahan atau kekeliruan akibat manusia menyebabkan proses atau kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Dalam pembinaan yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus diperoleh beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor manusia, adapun kendala pada setiap bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan antara lain:

a. Bimbingan bidang Sosial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pembinaan bimbingan bidang sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, diperoleh beberapa kendala yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kekeliruan manusia, kendala tersebut antara lain kurangnya kehadiran instruktur disaat bimbingan bidang dimulai, masalah kehadiran

instruktur ini terdapat pada bimbingan bidang sosial kewirausahaan dan kewarganegaraan. Kendala ini mengakibatkan kurangnya jadwal pertemuan bimbingan bidang antara instruktur dan anak peserta didik. Kurangnya jadwal pertemuan tersebut menyebabkan tidak lengkapnya materi yang seharusnya disampaikan, sehingga peserta didik tidak mengerti dan memahami seluruh materi bimbingan bidang. Seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengatur ulang jadwal pertemuan dengan anak didik, sehingga seluruh materi bimbingan bidang yang telah ditetapkan dapat disampaikan dengan lancar.

Kendala selanjutnya yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu tidak tertibnya anak didik saat melaksanakan bimbingan bidang. Keadaan seperti ini tentunya akan mengakibatkan kurangnya konsentrasi baik dari instruktur maupun dari peserta didik sendiri. Kondisi tidak tertibnya anak didik ini seperti kebisingan dan keluar masuk anak didik, kondisi tersebut terjadi pada bimbingan bidang sosial kewirausahaan, kewarganegaraan, kesehatan bagi remaja, dinamika kelompok dan konseling. Kendala tidak tertibnya anak ini seharusnya dapat diselesaikan dengan memberikan pengarahannya yang tegas mengenai peraturan saat proses belajar mengajar berlangsung.

b. Bimbingan bidang keterampilan

Bimbingan bidang keterampilan juga memiliki beberapa kendala mengenai faktor manusia. Kendala yang terjadi yaitu pada bimbingan bidang keterampilan teknik las. Kondisi peserta didik pada laboratorium teknik las yang tidak tertib mengakibatkan kurangnya konsentrasi dari peserta didik dan instruktur pembimbing. Hal ini seharusnya dapat diselesaikan dengan memberikan peraturan

tata tertib laboratorium yang jelas dan memberikan hukuman apabila terdapat kecurangan atau kesalahan.

2. Faktor Alat dan Perlengkapan

Faktor alat dan perlengkapan merupakan kendala yang terjadi akibat kurangnya ketersediaan alat atau perlengkapan, rusaknya alat atau perlengkapan dan penggunaan alat atau perlengkapan yang sudah tua. Berikut kendala yang terjadi pada setiap bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan mengenai faktor alat dan perlengkapan, antara lain :

a. Bimbingan bidang Sosial

Kendala yang disebabkan oleh faktor alat dan perlengkapan yang terjadi pada bimbingan bidang sosial kewarganegaraan, kewirausahaan, etika sosial, kepemimpinan, kesehatan bagi remaja, dinamika kelompok dan konseling ialah kendala pada fasilitas pembantu saat proses belajar mengajar berlangsung. Adapun fasilitas tersebut antara lain pengeras suara yang digunakan oleh instruktur untuk mengajar tidak berfungsi dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan ataupun perawatan secara berkala agar pengeras suara tersebut dapat digunakan oleh instruktur dengan baik. Selanjutnya kendala pada penggunaan infokus yang masih belum optimal digunakan oleh instruktur untuk menampilkan slide presentasi untuk bahan bimbingan bidang, kurangnya pelatihan pada penggunaan infocus ini mengakibatkan kurangnya pemakaian infocus pada proses belajar mengajar. Solusi yang baik untuk mengatasi masalah penggunaan infocus ini yaitu dengan memberi pembinaan kepada instruktur pengajar untuk menggunakan infocus dengan baik dan benar. Kemudian kendala

terakhir pada faktor alat dan perlengkapan ini ialah kurangnya ketersediaan penyejuk ruangan seperti kipas angin didalam kelas untuk bimbingan bidang sosial. Hal tersebut menyebabkan kondisi ruangan yang tidak nyaman dan mengakibatkan kurangnya konsentrasi dari peserta didik maupun instruktur pembimbing. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus memberikan fasilitas yang cukup untuk menciptakan kondisi ruangan yang nyaman dan aman.

b. Bimbingan bidang Keterampilan

Faktor penghambat alat dan perlengkapan juga terdapat pada bimbingan bidang keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Pada bimbingan bidang keterampilan otomotif terdapat kurangnya alat dan bahan otomotif ini yaitu pada alat dan perlengkapan sepeda motor. Kurangnya alat dan perlengkapan yang terdapat pada bimbingan bidang keterampilan otomotif tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan melakukan perencanaan kebutuhan alat dan perlengkapan yang baik dari masing-masing instruktur keterampilan tersebut. Sehingga dengan perencanaan tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan alat dan perlengkapan yang digunakan dalam laboratorium. Selanjutnya juga terjadi kekurangan daya listrik pada bimbingan bidang keterampilan tata rias, kurangnya daya listrik ini mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan bimbingan bidang yang dilakukan.

3. Faktor Metode

Kendala pada faktor metode merupakan kendala yang terjadi akibat

kesalahan dan kekeliruan perencanaan ataupun proses pelaksanaan bimbingan bidang yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus juga terdapat kendala akibat faktor penghambat metode pada bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan. Berikut penjelasan dari kendala tersebut:

a. Bimbingan bidang Sosial

Kendala faktor penghambat metode terjadi pada bimbingan bidang sosial kewirausahaan, kewarganegaraan, dinamika kelompok dan konseling. Pada bimbingan bidang-bimbingan bidang sosial tersebut memiliki kendala yang sama yaitu pada metode penyampaian materi yang kurang baik oleh instruktur. Apabila kendala ini terus berlangsung, akan mengakibatkan tidak tertibnya anak didik didalam kelas yang tidak tertarik dengan cara penyampaian instruktur, sehingga akan menyebabkan kurangnya kemampuan anak. Kendala ini dapat diselesaikan dengan pembinaan secara berkala terhadap cara belajar mengajar yang baik, pembinaan ini dapat dilakukan untuk instruktur yang mengajar bimbingan bidang, maupun kepada anak didik yang menerima bimbingan bidang.

b. Bimbingan bidang Keterampilan

Untuk bimbingan bidang keterampilan juga memiliki faktor penghambat dalam hal metode. Pada bimbingan bidang keterampilan menjahit, terdapat kendala pada proses perawatan alat jahit yang kurang baik, hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan dan tidak berfungsinya dengan baik alat yang digunakan. Seharusnya pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus khususnya instruktur bimbingan bidang keterampilan menjahit melakukan

perawatan secara berkala terhadap alat-alat laboratorium yang digunakan. Dengan melakukan perawatan secara berkala tersebut diharapkan seluruh alat yang digunakan dalam proses bimbingan bidang dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Kemudian jurusan keterampilan yang hanya empat jurusan seharusnya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus melakukan penelitian untuk menentuka jenis jurusan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui minat dan bakat anak dengan memperhatikan perkembangan usaha yang ada sekarang ini di masyarakat.

4. Faktor Lingkungan

Faktor penghambat lingkungan merupakan faktor yang berhubungan dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam sekitar. Dari hasil penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, diperoleh faktor penghambat lingkungan ini hanya terdapat pada masalah lingkungan alam sekitar. Berikut kendala faktor lingkungan yang terjadi pada bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan, antara lain :

a. Bimbingan bidang Sosial

Faktor penghambat lingkungan yang terjadi pada bimbingan bidang sosial kewarganegaraan, kewirausahaan, etika sosial, kepemimpinan, kesehatan bagi remaja, dinamika kelompok dan konseling ialah kondisi ruangan kelas bimbingan bidang yang tidak nyaman akibat suhu udara yang tinggi. Kelas yang tidak nyaman ini mengakibatkan kurangnya konsentrasi instruktur pembimbing dan anak didikuntuk mengikuti proses belajar mengajar didalam kelas. Berdasarkan hal ini seharusnya pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus memenuhi seluruh kebutuhan ruangan kelas agar kondisi lingkungan didalam kelas menjadi nyaman dan memiliki suhu udara yang aman.

b. Bimbingan bidang Keterampilan

Bimbingan bidang keterampilan juga memiliki kendala yang diakibatkan oleh faktor penghambat lingkungan. Pada bimbingan bidang keterampilan tata rias terjadi kekurangan pasokan air sehingga pada saat kegiatan praktek yang membutuhkan air tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya yang mengakibatkan bimbingan bidang tata rias tidak akan berjalan dengan optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus menghasilkan beberapa kesimpulan penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Program BRSAMPK “Rumbai” dalam membina remaja putus sekolah, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus belum terlaksana secara optimal dalam membina remaja putus sekolah.
2. Faktor penghambat yang terdapat pada proses pembinaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yaitu :
 - a. FaktorManusiaKendala yang disebabkan oleh faktor manusia ialah kurangnya kehadiran instruktur pembimbing dalam setiap bimbingan bidangsosial maupun bimbingan bidang keterampilan dan tidak tertib nya anak saat kegiatan berlangsung.
 - b. Faktor Alat dan Perlengkapan
Kendalayanterjadi pada faktor penghambat ini yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas dalam ruangan belajar mengajar dan kurangnya alat dan perlengkapan pada laboratorium keterampilan.
 - c. Faktor Metode
Kendala yang diperoleh dari faktor penghambat metode ini yaitu

kemampuan instruktur dalam melakukan bimbingan bidang yang kurang optimal kepada anak dan kendala dalam perawatan alat dan perlengkapan pendukung bimbingan bidang yang kurang baik.

d. Faktor Lingkungan

Kendala yang disebabkan oleh faktor lingkungan ialah kondisi ruangan proses belajar mengajar yang tidak nyaman dikarenakan kurangnya fasilitas pendingin ruangan dan kurangnya pasokan air.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya :

1. Pemerintah seharusnya memperhatikan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam hal mensejahterakan remaja putus sekolah yang terdapat didalam Balai.
2. Untuk instruktur pembina di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebaiknya lebih diberikan pemahaman mengenai upaya mensejahterakan remaja putus sekolah dalam kegiatan bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan didalam Balai.
3. Anak didik pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebaiknya mengikuti seluruh bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan didalam Balai dengan tertib dan serius.
4. Setiap fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan bidang sosial maupun bimbingan bidang keterampilan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada pada

saat sekarang ini.

5. Sebaiknya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan jenis jurusan dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan usaha di masyarakat saat sekarang ini serta minat dan bakat anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agus, Purwanto, Erwan, 2012. *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta, Gava Media
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Alfabeta. Bandung.
- A.W.Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Dunn, William, 1995. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi II, Gajah Mada Universitas Press Yogyakarta.
- Edward III, Meriles S, 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Press, Washington.
- Edy Soekarno, 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gibson James. L, Ivancevich John M dan Donnely James H, Jr, 2006. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2004. *Super Teens-jadi remaja Luar Biasa dengan kebiasaan Efektif*, Bandung, Angkasa.
- N, Dunn, William, 2004. *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nugroho D, Rian, 2003. *(Dalam Eka 2005:14) Analisis Kebijakan Publik*, Elexindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ratminto, 2005. *Manajemen pelayanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Saydam, Gouzali, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Djambatan, Jakarta

- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P, 2002. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2003. *M.P.A, Filsafat Administrasi*, Bumi Angkasa
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Stephen P. Robin, 2000, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Admistrasi Publik*, PT. Repika Aditama, Bandung.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha. Miftah, 2002. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, Jawa Press.
- Wibowo, Edi. 2003, *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2005, *Fungsi-fungsi Manjemen Suatu Bacaan Pengantar*, Buku Ajar, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Dokumentasi:

- Undang-Undang nomor. 6 Tahun 1974, tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang nomor. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 1988, Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1990, tentang kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 1990, tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak
- Pedoman Penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Direktorat Bina Pelayanan Sosial

Anak Departemen sosial R.I

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau